

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan (Arikunto, 2010: 58). Penelitian ini menggunakan berbagai sumber dan literatur baik berupa buku maupun referensi lain sebagai dasar teori dalam analisis perhitungan. Pada kajian pustaka, dilakukan kajian mengenai teori yang digunakan terdiri dari: *grand theory*, *middle range theory*, *applied theory*. Selain teori, dilakukan juga pengkajian hasil para peneliti sebelumnya dari jurnal-jurnal yang mendukung penelitian ini. Ruang lingkup hasil kajian atas teori-teori, penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Tindakan Sosial

Berdasarkan pemikiran Weber, Durkheim dan Pareto dalam Scott (2012: 121) individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu. Di sini Weber melihat tindakan sosial berkaitan dengan interaksi sosial. Sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Sementara rasionalitas dipahami sebagai individu yang menjadi agen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan utilitas yang diterima dalam aktivitas produktif dan hubungan pertukaran serta menganggap keteraturan sosial adalah 'resultan' kompleks dari tindakan individu. Dengan konsep rasionalitas, Weber membagi beberapa macam tindakan sosial. Semakin rasional tindakan sosial tersebut, maka semakin mudah memahaminya. Adapun pembagian tindakan sosial itu terbagi menjadi empat macam yaitu:

- 1) Pertama tindakan rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dan menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Bila individu tersebut bertindak rasional maka tindakannya pun dapat dipahami.

commit to user

- 2) Kedua rasionalitas yang berorientasi nilai, yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tindakan ini masih rasional meski tidak serasional tindakan pertama, sehingga tindakannya masih dapat dipahami.
- 3) Ketiga tindakan afektif (*affectual*), yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan individu yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan seseorang berdasarkan perasaan yang dimilikinya, biasanya timbul secara spontan begitu mengalami suatu kejadian. Tindakan ini sukar dipahami karena kurang rasional.
- 4) Keempat tindakan tradisional, yaitu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging. Tindakan ini biasanya dilakukan atas dasar tradisi atau adat istiadat secara turun-temurun. Tindakan ini pun sukar dipahami karena kurang rasional bahkan tidak rasional.

Dalam hubungan sosial selalu ada pengorganisasian dan pengorganisasian tersebut dipertahankan melalui wewenang. Weber menjelaskan hubungan sosial ini berdasarkan atas rasional formal, karenanya terdapat suatu pengorganisasian. Dan pengorganisasian tersebut dipertahankan melalui wewenang (otoritas, legitimasi). Weber (1968: 215) membagi 3 tipe otoritas / legitimasi, yaitu:

- 1) Otoritas Tradisional: Berasal dari kepercayaan dan faktor keturunan atau garis keluarga atau kesukuan. Otoritas tradisional ini berdasarkan pada penerimaan kesucian aturan-aturan karena aturan-aturan itu telah lama ada dan dalam legitimasi mereka yang telah mewariskan hak untuk memerintah dengan aturan-aturan ini. Di dalam tatanan tradisional individu merupakan loyalitas dari masa lalu dan mereka mewakili masa lalu itu, sebuah loyalitas yang seringkali berakar dalam sebuah kepercayaan akan kesakralan peristiwa-peristiwa sejarah tertentu. Misalnya seorang kyai, maka anak dan keturunan kyai akan cenderung menjadi kyai pula karena tradisi yang diterima oleh masyarakatnya. Walaupun seringkali sang kyai muda ini tidak memiliki ilmu agama yang memadai. Tetapi tidak ada orang yang menentang karena mereka percaya.

- 2) Otoritas Karismatik: Berasal dari anggapan atau keyakinan bahwa seorang pemimpin (pemegang otoritas) itu memiliki kelebihan yang luar biasa (linuwih, Jawa). Contohnya, empu yang punya kesaktian (dia sekaligus memiliki otoritas karismatik), Soekarno yang dianggap (minimal oleh pemujanya) kekuatan “supra”, dsb.
- 3) Otoritas Legal-Rasional: Berasal dari peraturan (legal-rasional) yang diberlakukan secara hukum dan rasional. Dan pemimpin yang lahir dari otoritas ini berdasarkan atas kemunculan yang legal dan rasional pula. Misalnya pemimpin organisasi modern, Ketua RT, RW, yang dipilih secara langsung oleh musyawarah warga RT, RW. Mereka memperoleh otoritas tertinggi dari hukum masyarakat.

Weber menyatakan bahwa tindakan sosial berkaitan dengan interaksi sosial, sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Weber menggunakan konsep rasionalitas dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan rasional adalah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lain dalam masyarakat. Weber membagi tindakan rasional ini kepada empat jenis atau bentuk. Pertama ialah tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang diarahkan secara rasional untuk mencapai sesuatu tujuan yang tertentu. Kedua ialah tindakan rasional nilai yaitu tindakan yang akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan atas dasar keyakinan seseorang individu terhadap nilai-nilai estetika, etika atau keagamaan. Ketiga ialah tindakan emosional yaitu segala tindakan seseorang individu yang akan dipengaruhi oleh perasaan dan emosi. Jenis atau bentuk tindakan terakhir yang dinyatakan oleh Max Weber ialah tindakan tradisonal yaitu tindakan di mana seseorang akan melakukan suatu tindakan hanya karena mengikuti amalan tradisi atau kebiasaan yang telah berlaku.

2. Teori Motivasi Berdasarkan Kebutuhan

Teori kebutuhan Maslow dalam Reksohadiprojo dan Handoko (1996) mengkategorikan pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif, tetapi kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam

satu ketika dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Tidak ada dua orang yang *basic need*-nya terpuaskan 100%. Dalam mencapai kepuasan kebutuhan, seseorang harus berjenjang, tidak peduli seberapa tinggi jenjang yang sudah dilewati, kalau jenjang di bawah mengalami ketidakpuasan atau tingkat kepuasannya masih sangat kecil, dia akan kembali ke jenjang yang tak terpuaskan itu sampai memperoleh tingkat kepuasan yang dikehendaki.

1) Kebutuhan fisiologis (*Physiological needs*)

Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat neostatik (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat, dalam keadaan absolut (kelaparan dan kehausan) semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini.

2) Kebutuhan keamanan (*Safety*)

Sesudah kebutuhan keamanan terpuaskan secukupnya, muncul kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Kebutuhan fisiologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, sedang keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang.

3) Kebutuhan Sosial (*Social needs*)

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya. Sesudah kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif terpuaskan, kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Orang sangat peka dengan kesendirian, pengasingan, ditolak lingkungan, dan kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan dimiliki ini terus penting sepanjang hidup. Ada dua jenis cinta (dewasa) yakni:

- a) *Deficiency* atau *D-Love* dapat diartikan sebagai kebutuhan cinta karena kekurangan, itulah *D-Love*; orang yang *commit to user* mencintai sesuatu yang tidak

dimilikinya, seperti harga diri, seks, atau seseorang yang membuat dirinya menjadi tidak sendirian. Misalnya: hubungan pacaran, hidup bersama atau perkawinan yang membuat orang terpuaskan kenyamanan dan keamanannya. *D-love* adalah cinta yang mementingkan diri sendiri, yang memperoleh daripada memberi.

- b) B-Love didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya, tanpa keinginan mengubah atau memanfaatkan orang itu. Cinta yang tidak berniat memiliki, tidak mempengaruhi, dan terutama bertujuan memberi orang lain gambaran positif, penerimaan diri dan perasaan dicintai, yang membuka kesempatan orang itu untuk berkembang.

4) Kebutuhan Penghargaan (*Self Esteem*)

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta efektivitas kerja seseorang. Ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai sudah relatif terpuaskan, kekuatan motivasinya melemah, diganti motivasi harga diri. Ada dua jenis harga diri: 1. menghargai diri sendiri (*self respect*): kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. 2. mendapat penghargaan dari orang lain (*respect from other*): kebutuhan prestise, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima dan apresiasi. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal dengan baik dan dinilai dengan baik oleh orang lain.

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self Actualization*)

Akhirnya sesudah semua kebutuhan dasar terpenuhi, muncullah kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan menjadi sesuatu yang orang itu mampu mewujudkannya secara maksimal seluruh bakat kemampuan potensinya. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri (*Self fullfilment*), untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang dapat mencapai tingkat aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan dari

kebutuhan-kebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu.

3. Pengentasan Kemiskinan

a. Kriteria Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata miskin mendapat awalan ke dan akhiran menjadi kemiskinan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ana dan Suharso. 2012: 581). Selanjutnya menurut pendapat Todaro, (2002: 200) salah satu generalisasi yang terbilang paling valid mengenai penduduk miskin adalah bahwa mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah perdesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional. Pada umumnya ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa untuk membandingkan tingkat kesejahteraan seseorang dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat konsumsi mereka. Hal ini mengingat tingkat konsumsi memang mudah diukur dan dapat dikualifikasikan dengan mudah, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, serta rasa aman dari tindak kekerasan dan dapat berpartisipasi didalam kehidupan sosial politik.

Menurut Suparlan (1984: 12) kemiskinan diartikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah; yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tolok ukur yang digunakan adalah batasan tingkat pendapatan per waktu kerja Rp 30.000,000,00 (per bulan atau lebih rendah) yang dibuat berdasarkan atas batas minimal jumlah kalori yang dikonsumsi per orang yang diambil persamaannya dalam beras adalah 320 kg di desa dan di kota 420 kg per tahunnya (Sajogyo, 1977: 34).

Pengertian kemiskinan itu amat luas tetapi para ahli ekonomi mengelompokkan ukuran kemiskinan menjadi 2 macam yaitu: **pertama**, kemiskinan absolut yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari suatu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

pokoknya seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Ukuran ini dikaitkan dengan batasan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak. Seseorang yang mempunyai pendapatan di bawah kebutuhan minimum maka orang tersebut dikatakan miskin. **Kedua**, kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif ini seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin. Kondisi seseorang atau keluarga apabila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya mempunyai pendapatan yang lebih rendah, maka keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Dengan kata lain kemiskinan ditentukan oleh keadaan sekitarnya dimana orang tersebut tinggal (Arsyad, 1999: 70-71).

Pendapat lain adalah Mubyarto, (1997: 4) memberikan definisi kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya keterampilan, produktivitas, pendapatan, lemahnya nilai tukar produksi dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Dengan rendahnya pendapatan penduduk miskin menyebabkan rendahnya produktivitas dan akan meningkatkan beban ketergantungan bagi masyarakat. Midgley, et al., (2009: 4) menyatakan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi *Deprivasi* (Kesenjangan). Materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi individu yang mengalami *deprivasi relatif* (Deprivasi relatif adalah keadaan psikologis dimana seorang merasakan ketidakpuasan atau kesenjangan atau kekurangan yang subyektif pada saat keadaan diri dan kelompoknya di bandingkan dengan kelompok lain). Dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

Selanjutnya BAPPENAS dalam Laporan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (1993: 67) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh orang miskin, tetapi karena keadaan yang tidak bisa dihindari oleh kekuatan yang ada padanya. Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi

kurang sejahtera yang dihitung dalam Rp (Rupiah) per kapita per bulan, sedangkan disisi yang lain, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) sebagai tolok ukur, dalam pengertian ini definisi kemiskinan diterjemahkan sebagai kondisi kurang akibat kebutuhan hidup (makanan, minuman, pakaian, rumah) selama satu bulan berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak untuk seorang pekerja. Kebutuhan konsumsi harus memenuhi 2100 kalori per hari (kelompok makanan) ditambah dengan kebutuhan (bukan makanan) minimal lainnya yang mencakup perumahan, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pembangunan berkelanjutan secara sadar turut memperhitungkan komponen lingkungan yang tidak dapat dipisahkan (*non-marketable components*) seperti nilai sumber daya hayati yang utuh dihutan, bebas polusi, bebas kebisingan dan hal-hal lainnya yang meningkatkan kualitas lingkungan (Soesastro, 2005: 260– 261).

Pengertian kemiskinan antara satu negara dengan negara lain juga berbeda. Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. 14 Kriteria miskin menurut standard statistik BPS tersebut adalah: Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang; Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain; Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan; Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah; Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu; Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya

dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan; Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/tamat SD; Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dari 14 kriteria tersebut, jika minimal 9 variabel terpenuhi maka termasuk suatu rumah tangga miskin (BPS, Oktober 2016). Guna menanggulangi tingkat kemiskinan dan pengendalian penduduk upaya pemerintah melalui berbagai program terus dilakukan. Dalam hal sasaran program, pemerintah memperbarui sasaran programnya, misalnya untuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan memperbarui datanya. Pada tahun 2008, pemerintah melalui BPS memperbarui data penerima program dengan melakukan pemutakhiran data Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk Tahun 2005 (PSE 05) dan dinamai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008. Pemutakhiran data ini dilakukan pada Oktober 2008 dan dimaksudkan agar manfaat Program BLT menjangkau kalangan yang lebih luas, yaitu rumah tangga yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, pendataan PPLS 2008 tidak hanya menjangkau rumah tangga sangat miskin dan miskin sebagaimana dalam PSE05, tetapi juga rumah tangga yang mendekati miskin.

Selanjutnya dilakukan Pemutakhiran data PSE08 dalam PPLS 2008 menggunakan pendekatan karakteristik rumah tangga dengan 14 variabel kualitatif penjas kemiskinan, yaitu: luas lantai per kapita, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar, pembelian daging/ayam/susu, frekuensi makan, pembelian pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan usaha kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan aset yang dimiliki.

Dalam PSE08, sebuah rumah tangga dikatakan miskin jika, Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² per orang; lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester; tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban; sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan

listrik; air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan; bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah; hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari; tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan; pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD; dan tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

b. Penyebab Kemiskinan

Membahas kemiskinan sebetulnya tinggal dari sudut mana kita memandang dan dengan kondisi yang bagaimana kita akan menggarap dan mengentaskan kemiskinan, maka kita perlu pula mengetahui faktor penyebab kemiskinan. Menurut Sharp dalam Kuncoro, *Just another Word* (2006) meliputi: 1) rendahnya kualitas angkatan kerja: Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah karena rendahnya kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja ini bisa dilihat dari angka buta huruf. Sebagai contoh Amerika Serikat hanya mempunyai angka buta huruf sebesar 1 persen, dibandingkan dengan Ethiopia yang mempunyai angka di atas 50 persen; 2) akses yang sulit terhadap kepemilikan modal: Kepemilikan modal yang sedikit serta rasio antara modal dan tenaga kerja (*capital-to-labor ratios*) menghasilkan produktivitas yang rendah yang pada akhirnya menjadi faktor penyebab kemiskinan; 3) rendahnya tingkat penguasaan teknologi: Negara-negara dengan penguasaan teknologi yang rendah mempunyai tingkat produktivitas yang rendah pula. Tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini disebabkan oleh kegagalan dalam mengadaptasi teknik produk yang lebih modern. Ukuran tingkat penguasaan teknologi yang rendah salah satunya bisa dilihat dari penggunaan alat-alat produksi yang masih bersifat tradisional; 4) penggunaan sumber daya yang tidak

efisien: negara miskin sumber daya yang tersedia tidak dipergunakan secara penuh dan efisien. Pada tingkat rumah tangga penggunaan sumber daya biasanya masih bersifat tradisional yang menyebabkan terjadinya inefisiensi; 5) pertumbuhan penduduk yang tinggi: Menurut teori Malthus jumlah penduduk berkembang sesuai deret ukur sedangkan produksi bahan pangan berkembang sesuai deret hitung. Hal ini mengakibatkan kelebihan penduduk dan kekurangan bahan pangan. Kekurangan bahan pangan merupakan salah satu indikasi terjadinya kemiskinan.

Menurut Kuncoro, (2006: 107) penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut: 1) secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah; 2) kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah; 3) kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal sedangkan Ismawan (2003: 102) mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertidadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan berbagai pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

c. Teori Kemiskinan

Salah satu yang menjadi pusat perhatian pemerintah adalah pengentasan kemiskinan, bahkan pengentasan kemiskinan selalu menjadi agenda utama bagi negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan permasalahan yang menyangkut keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu teori kemiskinan yang terkenal adalah Teori Anggaran pro kaum miskin. Anggaran pro kaum miskin adalah penganggaran berdasarkan penilaian kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan

proses yang melibatkan kelompok miskin untuk ikut menentukan skala prioritasnya (Fernandez, 2009: 15).

Pengertian lain, anggaran pro kaum miskin dimaknai sebagai sebuah penganggaran yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat khususnya kelompok masyarakat miskin melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel (Fernandez, 2009: 27). Teori ini menawarkan solusi penanggulangan kemiskinan dengan bertolak pada akar masalah kemiskinan itu sendiri. Definisi di atas menghasilkan sebuah pandangan yang melihat anggaran negara sebagai instrumen pemberdayaan. Sedangkan proses penganggaran itu sendiri dipandang sebagai proses politik di mana partisipasi kaum miskin mutlak diperlukan, sekalipun demokrasi perwakilan telah berjalan.

Guna memahami anggaran pro kaum miskin ini, tidak hanya soal logika anggaran dan penganggaran, tetapi juga memahami kemiskinan yang memiliki dimensi jauh lebih luas dari pada sekedar pendapatan yang rendah. Anggaran Pro Kaum Miskin: Konsep dan Praktik, dalam Anggaran Pro kaum Miskin: Sebuah upaya menyejahterakan kaum miskin, Waidl et al., (2009: 94), Sentralitas peran anggaran dalam kehidupan publik menjadikan penentuan prioritas anggaran sudah semestinya melewati uji publik. Keterlibatan publik akan memberikan pertimbangan rasional untuk menghasilkan program program dan prioritas anggaran yang efisien, tepat sasaran, tepat waktu dan tentu saja legitimasi hukum yang lebih kuat. Upaya monitoring dalam pelaksanaan program ini juga sangat diperlukan. selama ini upaya-upaya monitoring dan audit sosial oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil terhadap program-program anti kemiskinan di Indonesia masih belum tergarap dengan baik. Upaya *monitoring* ini perlu dilakukan agar dapat diketahui dampak dari implementasi program dan siapa yang memperoleh manfaat dari program tersebut. Tanpa audit sosial yang meninjau lebih jauh kemanfaatan program, maka akan sulit untuk menilai efektivitas program-program pemberdayaan dan bantuan bagi masyarakat miskin yang tercantum dalam APBN atau APBD.

Untuk mengetahui apakah penganggaran yang dilakukan pro kemiskinan atau tidak, dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1) tersedia

mata anggaran yang khusus ditujukan untuk masyarakat miskin dalam menanggulangi keadaan darurat atau bencana; 2) mengalokasikan dana langsung diterima oleh kelompok miskin dengan besar persentase yang proporsional sesuai dengan tingkat kemiskinan wilayah yang bersangkutan; 3) belanja kegiatan (berdasarkan kelompok target dan lokasi) program penanggulangan kemiskinan lebih banyak dari biaya operasional pelaksanaan program itu sendiri; 4) penetapan pagu indikatif anggaran dan skala prioritas yang terbuka untuk dicermati masyarakat.

Dari sekian teori yang ada khususnya teori-teori yang sudah diterapkan, ternyata belum mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang sangat serius di beberapa Negara termasuk di Indonesia. Ketidakberhasilan tersebut dimungkinkan karena kesalahpahaman dalam pelaksanaan teori. Selain itu, bisa saja karena pada dasarnya sistem itu hanya mampu memperbaiki perekonomian masyarakat yang mempunyai kekuatan untuk meningkatkan perekonomiannya, sedangkan masyarakat masih jauh tertinggal dan tidak mampu mengikuti perjalanan sistem akan semakin tertinggal. Sehingga permasalahan baru yang muncul adalah kesenjangan sosial yang meningkat begitu tajam.

4. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, efektivitas sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno (1994: 16) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Selanjutnya Steers (1985: 87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program dalam suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu, untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa

mengesampingkan cara dan sumber daya serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2016: 31). Pengertian efektivitas disini merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas diartikan juga sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif (Ulum, 2004: 39).

Menurut Bastian (2013: 47), efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikatakan juga bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengertian efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

Effendy (2016: 43) menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang dapat terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Maka apabila ada seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan yang dikehendakinya dan direncanakan sebelumnya.

Menurut Mahmudi (2005: 92) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, sehingga semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Lebih lanjut Agung Kurniawan mendefinisikan “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan sesuatu tugas, fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya dengan tanpa tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005: 109). Efektivitas merupakan sebuah keberhasilan yang dicapai terhadap tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai efektivitas diperlukan suatu usaha agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sebagai ukuran yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan suatu target atas sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Dalam mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Jika di lihat dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur pula dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat dan menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tidak terpenuhi, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978: 77), yaitu: 1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai; 2) kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat didalam pencapaian tujuan organisasi; 3) proses analisis dan perumusan kebijakan

yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional; 4) perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan; 5) penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; 6) tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; 7) pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; 8) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Martani dan Lubis (1987: 55) kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu: 1) pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi; 2) pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi; 3) pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Dalam memahami tentang efektivitas maka Steers dalam Tangkilisan (2005: 141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 1) Produktivitas kerja; 2) Kemampuan adaptasi kerja; 3) Kepuasan kerja; 4) Kemampuan berlabar; 5) Pencarian sumber daya. Sedangkan Duncan yang dikutip

commit to user

Steers (1985: 53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut

- 1) Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan Steers dalam Tangkilisan (2005: 141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: Produktivitas kerja; Kemampuan adaptasi kerja; Kepuasan kerja; Kemampuan berlaba dan Pencarian sumber daya.

Untuk mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas sendiri dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) dari barang dan jasa. Sehingga pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif.

commit to user

Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ulum, 2004: 49). Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Steers (1985: 38) alat ukur efektivitas kinerja yang meliputi: 1) kemampuan menyesuaikan diri (Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja didalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut); 2) prestasi kerja (Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya); 3) kepuasan kerja (tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi).

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Steers (1985: 53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: 1) pencapaian: tujuan pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar dapat dicapai tujuan akhir yang semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit; 2) integrasi: integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi; 3) adaptasi: adaptasi

adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

5. Pemberdayaan Masyarakat

a. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment* yang berarti pemberian kekuasaan. Pemberdayaan, jika diartikan secara keseluruhan merupakan “suatu proses pemberian ruang pada pengembangan keberagaman kemampuan manusia yang beragam” (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 78). Sehingga dalam proses pemberdayaan diperlukan pemahaman akan makna dalam suatu komunitas dan bagaimana kita berusaha dapat memampukan masing masing orang atau kelompok untuk benar-benar bisa mandiri dalam sektor usaha yang telah di yakini mampu mengembangkan dimasing-masing kelompok. Lebih lanjut menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Priyono dan Pranarka (1996: 3) kata “*empowerment*” dan “*empower*” diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, mengandung dua pengertian yaitu: pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Pada dasarnya konsep *empowerment* adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, maupun internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun bidang lainnya.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat menurut Suharto (2010: 60), pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan sesuatu gagasan dan aspirasi,

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan kehidupan.

Jika dilihat dari sisi proses menurut Mardikanto dan Soebianto (2012: 31) pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka mempunyai kemampuan yang terampil dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Dalam pengertian proses pemberdayaan masyarakat, Suharto (2010: 67-68), memberikan pandangan dalam proses pemberdayaan masyarakat, disingkat menjadi 5P, meliputi: Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal; Pembebasan: pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat; Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat guna memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya; Pemberdayaan: mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka; Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang, antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan hambatan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri dalam menggunakan daya yang dimiliki dengan cara mentransfer daya dari lingkungannya Payne (1997: 266) dalam buku "*modern social work theory*". Menurut Ife (1995: 182) dalam buku "*community development: creating community alternatives-vision, analysis and practice*" memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya *commit to user* penyediaan kepada orang-orang atas sumber,

kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi didalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Pengertian lain menurut Sutrisno (2000: 185), menjelaskan, bahwa dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat sasaran diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, di samping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Yang membedakan dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan untuk dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Tentang pemberdayaan, Friedman (1992: 26) berpendapat bahwa munculnya konsep pemberdayaan atau *empowerment* karena dua hal yakni kegagalan dari harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul akibat dari adanya alternatif-alternatif pembangunan yang dimasukkan nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Menurut Friedman dalam Harjanto (2008: 24), kegagalan dari harapan bukan merupakan alat ukur dari hasil kerja ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai normatif dari moral. Dalam pandangan ini maka Harjanto menegaskan bahwa kegagalan dari harapan akan merasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat.

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain, esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi masyarakat harus dipandang sebagai subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Sehingga diharapkan mereka mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh guna

menentukan masa depan mereka sendiri baik dalam perseorangan maupun dalam kelompok, dimana provider dari pemerintah dan lembaga *non government organization/NGO* hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan sebagai motivator. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka peneliti akan mengkaji Kinerja BAZKAR dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan yang akan dikaji dari dua dimensi yaitu bagaimana prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, bagaimana prosesnya.

b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemahaman tentang pembangunan masyarakat yang harus dilandasi penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sangatlah penting, sehingga derap langkah pembangunan terus berjalan sesuai proses dan standar yang jelas, Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, menurut Suharto, (2006: 68) adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerjasama sebagai mitra.
- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- 3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- 4) Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- 5) Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- 6) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.
- 7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil perlu dirumuskan oleh mereka sendiri.

- 8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.
- 9) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut dengan efektif.
- 10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- 11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan melalui pembangunan ekonomi secara paralel.

Jim Ife (2002: 231-257) mengutarakan 26 prinsip dalam pengembangan masyarakat yang dikelompokkan ke dalam 5 prinsip yaitu prinsip ekologis, prinsip keadilan sosial, prinsip menghargai lokal, prinsip proses, serta prinsip global dan lokal. Ife menekankan bahwa prinsip-prinsip *community development* tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan terkait. Prinsip-prinsip *community development* yang disampaikan oleh Ife (2002) yang sesuai dengan analisis penelitian ini terdapat 6 prinsip yang digunakan sebagai berikut :

- 1) *Integrated development* (Pembangunan terpadu dan seimbang): Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan sebuah pembangunan yang terintegrasi, yang dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan spiritual. Dengan kata lain, ketika kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada satu aspek akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembangunan.
- 2) *Sustainability* (Berkelanjutan): Merupakan dua aspek penting dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan adalah pentingnya pembangunan tersebut memperhatikan dimensi keseimbangan ekologis dan keadilan sosial. Kegiatan pengembangan masyarakat harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan, sehingga penggunaan bahan-bahan yang *non-renewable* harus diminimalisir. Hasil kegiatan pengembangan masyarakat pun tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup manusia. *Sustainability* ini mengandung pengertian pula bahwa kegiatan pengembangan tidak hanya untuk kepentingan sesaat, namun harus memperhatikan sifat keberlanjutan dari

commit to user

kegiatan yang direncanakan dengan mengedepankan isu ekologis terhadap kualitas lingkungan dan SDA.

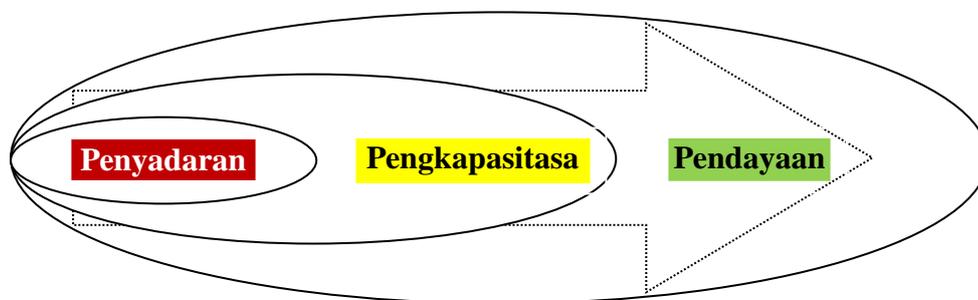
- 3) *Empowerment* (Pemberdayaan): pemberdayaan mengandung arti menyediakan sumber-sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan masa depannya dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa pengembangan masyarakat menjadi proses belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan dirinya, sehingga kegiatan pengembangan masyarakat dapat berkelanjutan.
- 4) *The Integrity of Process* (Keterpaduan Proses): Pengembangan masyarakat tidak hanya mementingkan hasil, namun juga proses itu sendiri. Proses di dalam pengembangan masyarakat akan melibatkan berbagai pihak, berbagai teknik, berbagai strategi, yang kesemuanya harus terintegrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar. Proses yang digunakan dalam pengembangan masyarakat sama pentingnya dengan hasilnya, dan dalam segala sudut pandang dalam melihat hasil tujuan. Integritas dari proses adalah bertujuan untuk menjamin peningkatan pengembangan masyarakat
- 5) *Participation* (Partisipasi): pengembangan masyarakat sebisa mungkin memaksimalkan partisipasi masyarakat, dengan tujuan agar setiap orang dapat terlibat secara aktif dalam aktivitas dan proses masyarakat. Partisipasi ini juga harus didasarkan kepada kesanggupan masing-masing. Artinya bahwa setiap orang akan berpartisipasi dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian perlu diperhatikan adanya upaya-upaya yang dapat menjamin partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat. Apabila masyarakat aktif untuk berpartisipasi, maka semakin ideal kepemilikan komunitas dan proses untuk membuat pembangunan masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat inklusif akan dapat direalisasikan.
- 6) *Defining Need* (Mendefinisikan kebutuhan): Merupakan hal yang paling penting dalam menekankan pentingnya pendeskripsian kebutuhan dalam pengembangan masyarakat. Ada 2 prinsip dalam menentukan definisi

kebutuhan, yaitu pembangunan masyarakat harusnya dilakukan atas dasar kesepakatan dari berbagai elemen yaitu penduduk secara keseluruhan, konsumen, para penyedia layanan dan para peneliti; serta memperhatikan keadilan sosial dan ekologis.

c. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Paradigma pembangunan yang dianut oleh berbagai negara dan dibarengi kuatnya tuntutan peranserta masyarakat sipil serta pilihan program pembangunan yang memihak rakyat, menurut penyuluhan pembangunan menyesuaikan paradigma keilmuannya yang berorientasi pada sasaran penyuluhan atau pemberdayaan masyarakat yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat. Dalam tataran ini maka penyuluhan pembangunan sebagai bidang ilmu terapan, secara metodologis harus mampu menyesuaikan dan mengembangkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah teknis metodologis bagi pengembangan program penyuluhan tersebut.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowojoto (2007: 33) pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik. Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukanlah sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan, lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah.



Gambar 2.1 Tahapan Pemberdayaan.

Sumber: Wrihatnolo dan Dwidjowojoto (2007: 33)

Melalui gambar di atas dapat dilihat bahwa proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi berproses melalui tiga tahapan, yaitu:

- 1) Dalam tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan pemahaman dimana mereka mempunyai hak untuk menjadi mampu. Di samping itu juga mereka harus diberikan motivasi agar mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalisasikan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.
- 2) Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan guna mengelola peluang yang akan diberikan. Pada tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat tersebut.
- 3) Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut.

6. Perilaku

Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari pada manusia itu sendiri, perilaku juga adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik dapat diamati secara langsung atau tidak langsung. Dan hal ini berarti perilaku terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi yakni yang disebut rangsangan, dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi perilaku tertentu (Notoatmodjo, 2007).

Perilaku adalah tindakan atau pola respon yang dilakukan oleh seseorang pada situasi tertentu. Perilaku seseorang menyangkut tindakan atas respon hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sekitarnya yang dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi atau genetika. Perilaku sosial merupakan perilaku yang terjadi dalam situasi sosial

melalui cara orang berfikir, merasakan dan bertindak (Ramadhani, 2013:13). Perubahan adalah berubah dari satu bentuk ke bentuk lain yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan pada dasarnya mengarah pada situasi atau kondisi yang lebih baik. Namun tidak dapat dipungkiri terkadang perubahan juga mengarah pada situasi atau kondisi yang kurang baik. Dengan demikian, perubahan perilaku adalah perubahan tindakan, sikap atau pola respon seseorang terhadap situasi dan kondisi pada lingkungan sekitarnya.

Perilaku adalah aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal (Walgito, 1990: 15). Menurut Alwi et al., (2001: 859) perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan, sedangkan menurut Notoatmodjo (2007: 133) perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme dalam hal ini perilaku makhluk hidup yang bersangkutan. Perilaku makhluk hidup terutama manusia, pada hakikatnya adalah suatu tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri.

Manusia yang dikodratkan sebagai makhluk sosial, yaitu individu yang tidak bisa hidup sendiri, dalam kesehariannya membutuhkan orang lain dan saling berinteraksi. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial juga merupakan salah satu penyebab individu berperilaku. Skinner dalam Hergenhahn dan Olson (2008: 84-85) menyatakan ada dua jenis perilaku yaitu *respondent behavior* (perilaku responden) dan *operant behavior* (perilaku operan). Perilaku responden ditimbulkan oleh stimulus yang dikenali atau bergantung dari stimulus yang mendahuluinya, misalnya gerak refleks. Jenis perilaku yang kedua adalah perilaku operan yaitu perilaku yang diakibatkan oleh stimulus yang dikenal, biasanya lebih spontan.

Saifudin Azwar dalam bukunya menjelaskan bahwa perilaku sebagai reaksi bersifat sederhana maupun kompleks dan merupakan ekspresi sikap seseorang (Azwar, 2002: 9). Sikap itu sudah terbentuk dalam dirinya karena sebagai tekanan atau hambatan dari luar maupun dalam dirinya. Artinya potensi reaksi yang sudah terbentuk dalam dirinya akan muncul berupa perilaku aktual

sebagai cerminan sikapnya. Jadi jelas bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor dalam diri maupun faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang diamati langsung, maupun yang dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku merupakan cerminan kongkret yang tampak dalam sikap, perbuatan dan kata-kata yang muncul karena proses pembelajaran, rangsangan dan lingkungan (Tu'u, 2004: 63).

Menurut Lewin dalam Azwar (2002: 11), perilaku adalah fungsi karakteristik individu (motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan lain-lain) dan lingkungan, faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, terkadang kekuatannya lebih besar daripada karakteristik individu sehingga menjadikan prediksi perilaku lebih kompleks. Jadi, perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong dan kekuatan-kekuatan penahan.

Selanjutnya untuk mengkaji perilaku *mustahiq* dalam menerima dan mau merubah perilaku untuk tidak lagi berperilaku BABS dalam program jambanisasi masyarakat ini, digunakan teori perilaku sosial yang dikembangkan oleh Katz seperti yang dikutip Sutisna dalam buku Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran (2002: 103-106) mengemukakan tentang adanya beberapa fungsi sikap dalam upaya perubahan perilaku masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, sebagai berikut:

- 1) Fungsi prasarana (*The Utilitarian Function*) Fungsi *utilitarian* berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan hukuman. Pada fungsi ini Konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah produk itu memberikan kesenangan atau justru kekecewaan.
- 2) Fungsi Pertahanan diri (*The Ego-Defensive Function*) disini Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego.
- 3) Fungsi Ekspresi Nilai (*The Value-Expressive Function*) Sikap yang dikembangkan oleh konsumen terhadap suatu merek produk bukan didasarkan

commit to user

atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya (*self-concept*).

- 4) Fungsi Pengetahuan (*The Knowledge Function*) Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya.

Melalui kajian ini dapat dilihat hasilnya melalui pendekatan fungsi sebagai indikator perilaku masyarakat terhadap program pemberdayaan melalui program jambanisasi masyarakat apakah melalui indikator dan fungsi tersebut masyarakat penerima bantuan jamban keluarga di Kabupaten Karanganyar, baik yang dibantu melalui pemerintah, dana zakat dari BAZKAR serta yang diterima melalui CSR BANK JATENG telah mampu merubah perilaku masyarakat terhadap BABS.

7. Corporate Social Responsibility

a. Implementasi Corporate Social Responsibility

Pengertian *Corporate Social Responsibility* yang paling sering digunakan saat ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Archie B. Carroll pada akhir 1970, yang menjelaskan bahwa pada organisasi bisnis perlu memberi perhatian terhadap empat area tanggung jawab yang strategis, yaitu dalam bidang ekonomi, hukum, philantropis dan etis (Carr, 2004: 4). Pada tanggung jawab ekonomi berarti bahwa organisasi bisnis harus membangun kemampuan untuk memperoleh *profitabilitas* yang kuat sebelum mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial. Dalam pengertian ini organisasi bisnis yang beroperasi dalam koridor hukum harus memenuhi tanggung jawab hukum, sehingga secara etis harus bertanggung jawab, disini organisasi bisnis perlu melakukan apa yang dianggap benar dan adil, yang terakhir, aktivitas *philantropis* yang dilakukan oleh organisasi bisnis adalah jalan untuk memberi manfaat bagi masyarakat yang mendukung keberadaan organisasi bisnis (Carroll, 1998: 1-7).

Selanjutnya Kotler dan Lee, (2005: 3) mendefinisikan terminologi *Corporate Social Responsibility* sebagai: “*a commitment to improve community well-being through discretionary business and contributions of corporate resources*”. Definisi di atas tidaklah saja mengacu pada aktivitas bisnis yang patuh pada hukum atau sebatas pada moral dan etika, namun lebih dimaksudkan

sebagai komitmen sukarela yang dibuat oleh organisasi bisnis dalam memilih dan menerapkan praktek tanggung jawab sosial serta berkontribusi pada masyarakat. Komitmen tersebut, menurut Kotler dan Lee, harus ditunjukkan agar perusahaan dinilai sebagai organisasi yang secara sosial bertanggung jawab dan akan menjalankan praktek bisnis yang berdasar prinsip tanggung jawab sosial tersebut, baik secara moneter atau non-moneter. Istilah *community well-being* dalam definisi Kotler dan Lee adalah kondisi manusia sebagai anggota masyarakat, sebagaimana juga masalah lingkungan. Meluasnya perhatian pada praktek CSR tersebut mengundang berbagai pihak untuk memberikan pengertian dan definisi atas terminologi tersebut. Komisi Eropa mendefinisikan CSR sebagai “Integrasi secara sukarela oleh organisasi bisnis atas persoalan sosial dan lingkungan hidup dalam aktivitas komersial organisasi dan dalam hubungannya dengan berbagai pemangku kepentingan” (Fonteneau, 2003: 3).

Bagi sebuah organisasi bisnis, penerapan CSR memiliki dampak positif bagi kelangsungan usahanya. Pringle and Thomson (2001: xxi) menyatakan bahwa menghubungkan sebuah perusahaan atau sebuah merek dengan *charity* yang *relevan* dapat menghasilkan “*spirit of brand*”. Saat ini, menurut Pringle and Thomson, berpendapat bahwa konsumen menaruh perhatian yang lebih dari sekedar masalah fungsi sebuah produk atau manfaat rasional dari sebuah produk, namun juga memperhatikan pula pada aspek emosional dan psikologi dari kepribadian sebuah merek dan citra yang dihasilkan. Dalam hal ini konsumen lebih bergerak ke atas menuju puncak dari hierarki Maslow, yaitu mencari realisasi diri (Pringle and Thomson, 2001: xxii).

Corporate Social Responsibility menurut *World Business Council for Sustainable Development*, pengertian CSR merupakan komitmen berkesinambungan dari para kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya (Suharto, 2010: 123). Pandangan Gibson et al., (1996: 108) CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya yang harus dikeluarkan, melainkan sentra laba dimasa yang akan datang, dalam pengertian ini prinsip yang berkaitan erat dengan

CSR adalah responsibilitas yang merupakan aspek pertanggungjawaban dari setiap kegiatan perusahaan untuk melaksanakan prinsip *corporate social responsibility*. Karena dalam konteks berusaha, sebuah perusahaan tidak akan bisa lepas dari masyarakat sekitar, ditekankan juga pada *signifikansi filantropik* yang diberikan dunia usaha kepada kepentingan pihak-pihak eksternal dimana perusahaan diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan para *stakeholder* perusahaan.

Elvinaro dan Dindin (2011: 37) mendefinisikan CSR sebagai berikut: “*CSR is about capacity building for sustainable likelihood. It respects cultural differences and finds the bussines opportunities in building the skill of employees, the community and the government*”. Definisi ini memberikan penjelasan secara lebih dalam bahwa sesungguhnya CSR untuk membangun kapasitas yang kemungkinan berkelanjutan, CSR menghargai perbedaan budaya dan menemukan peluang dan potensi bisnis dalam membangun keterampilan, melalui komunitas dan pemerintah.

Pengertian CSR menurut Steiner 2009 dalam Lako, (2011: 212) “CSR adalah tanggung jawab dari suatu korporasi untuk menghasilkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak membahayakan, melindungi atau meningkatkan aset-aset sosial (*societal assets*)”. Sedangkan ruang Lingkup CSR menurut Elkingston’s dalam Wibisono (2007: 22) mengelompokan CSR atas 3 (tiga) aspek yang lebih dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*” yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*) dan keadilan social (*social justice*). Lebih lanjut ia juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*) harus memperhatikan “Triple P” yaitu *profit, planet and people*..

Pengertian ini jika dikaitkan antara “*Triple Bottom Line*” dengan “*Triple P*” dapat disimpulkan bahwa *profit* sebagai wujud aspek ekonomi, *planet* sebagai wujud aspek lingkungan, dan *people* sebagai wujud aspek sosial. Pada sisi lain Brodshaw dan Vogel juga menyatakan bahwa ada 3 (tiga) dimensi dari garis besar ruang lingkup CSR sebagai berikut Wahyudi, (2006: 46) yaitu;

- 1) *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan.
- 2) *Corporate responsibility* adalah usaha-usaha sebagai wujud *corporate social responsibility* ketika sedang mengejar *profit* sebagai tujuan perusahaan.
- 3) *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah.

Dalam implementasinya secara singkat bentuk dari CSR ini dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk (Wahyudi, 2008: 62) yaitu: 1) pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk didalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya; 2) kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang; 3) penanganan kelestarian lingkungan; 4) investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai kegiatan amal perusahaan.

Implementasi CSR seringkali tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat penerimanya, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan kurang tepatnya kebijakan program yang dilakukan karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan penerima sasaran. Perusahaan hanya menentukannya berdasarkan interpretasi sepihak dan evaluasi keuntungan ekonominya tanpa berorientasi perencanaan yang efektif dalam perumusan CSR (Taufiq et al., 2018: 137). Perencanaan menggunakan praktek strategi apa yang harus diadopsi dan bagaimana partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan dilakukan (Friedman, 1992: 26).

Dalam *Prince of Wales Foundation* ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR (Untung, 2007: 11) antara lain: 1) menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia; 2) *environment* yang berbicara tentang lingkungan; 3) *good Corporate Governance*, yaitu mekanisme bagaimana

sumber daya perusahaan dialokasikan menurut aturan; 4) *social cohesion* artinya dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial; 5) *economic strength* atau memperdayakan lingkungan menuju kemandirian bidang ekonomi. Bagi perusahaan publik CSR akan mempengaruhi *sustainability* dan *acceptability* (diterima dan berkelanjutan) karena keberadaannya diterima.

Di Indonesia perencanaan partisipatif diterapkan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. CSR sebagai bentuk kepedulian sosial untuk memberdayakan masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusannya. Perencanaan CSR yang selama ini melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk dari perencanaan partisipatif ternyata tidak dapat menjelaskan mengapa masih adanya ketidakpuasan di masyarakat. Filsafat ilmu pengetahuan sebagai bentuk kajian rasional memberikan pemahaman ontologi, epistemologi dan aksiologi terhadap fenomena yang ada di kehidupan manusia (Muhadjir, 2001; Suriasumantri, 1970 dalam Taufiq et al., 2018: 137). Melalui perspektif filsafat ilmu, fenomena perencanaan CSR tersebut dikaji untuk memberikan pembelajaran, bagaimana memahami dan menganalisisnya secara rasional agar memberikan pemahaman logika dan penalaran, sebagai salah satu sumber pengetahuan kontekstual secara eksplisit.

Perencanaan demokratis yang memiliki wewenang untuk menetapkan tujuan perencanaan dan cara mencapainya adalah masyarakat/publik. Perencanaan ini terdapat banyak kelompok dan kepentingan yang bertentangan, maka perencanaan demokratis perlu mendapatkan legitimasi dari semua kelompok dan kepentingan, dalam arti didukung oleh mayoritas masyarakat. Uraian tersebut menekankan pada teori perencanaan yang bertumpu pada perencanaan demokrasi (*democratic planning*) yang terbagi-bagi menjadi berbagai bentuk perencanaan, namun dalam hal ini untuk perencanaan CSR lebih menekankan pada partisipasi masyarakat sebagai salah satu bagian dari *democratic planning*. *Participatory planning* menekankan pada keikutsertaan masyarakat dalam menentukan tujuan perencanaan dan pelaksanaannya, masyarakat memberikan kontribusi dan menjadi lebih peka untuk menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan, namun lebih kompleks (Shalaby, 2013). *commit to user*

b. Tanggung Jawab Sosial BAZNAS

Setelah membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Maka pada bagian ini akan dibahas tentang tanggung jawab sosial secara umum dalam rangka memperjelas tugas tanggung jawab sosial BAZNAS sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana ZIS di Kabupaten Karanganyar. Menurut Januarti dan Apriyanti, tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan berbagai kebutuhan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, akan tetapi juga turut serta mempertahankan kualitas lingkungan sosial untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan komunitas (Januarti dan Apriyanti: 227-243).

Istilah tanggung jawab adalah beban yang wajib ditanggung seseorang atau sekelompok orang karena peran, status, sikap, atau hal lain yang dimiliki atau dilakukannya. Misalnya seorang ayah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga karena peranannya sebagai kepala keluarga hal ini memperlihatkan tanggung jawab seseorang secara pribadi atas peran atau perbuatannya sendiri. Selain tanggung jawab pribadi, ada juga tanggung jawab sosial yang diemban seseorang atau kelompok orang dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial ini muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap orang-orang dan lingkungan sekitar setelah tanggung jawab pribadinya terpenuhi. Sebagai contohnya sebuah lembaga organisasi di samping sebagai tempat berorganisasi dalam menjalankan fungsi dan profesinya guna mencapai tujuan organisasi dengan baik bagi lembaganya, namun juga diharapkan memiliki rasa tanggung jawab sosial dengan turut serta berpartisipasi didalam membangun dan melakukan perubahan kearah yang lebih baik untuk lingkungannya. Seperti dengan memberikan bantuan sosial kepada lingkungan yang ada disekitarnya dalam rangka ikut peduli membangun masyarakat menuju masyarakat yang maju makmur dan sejahtera.

Pendapat lain mengenai tanggung jawab sosial adalah Kast, (2003: 212) mengatakan bahwa sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan, kesehatan dan kerentangan sosial, hal ini dapat dilakukan atas dasar

suatu pemikiran semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungannya itulah maka suatu tanggung jawab sosial perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat. Tanggung jawab sosial merupakan konsekuensi logis keberadaan organisasi/lembaga disebuah lingkungan masyarakat mendorong keberadaan organisasi/lembaga untuk lebih aktif guna mengambil peran dan tanggung jawab sosial. Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan karena pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang dalam hal ini organisasi/lembaga, masyarakat, dan pemerintah.

1) Manfaat bagi organisasi/lembaga

Manfaat bagi suatu organisasi/lembaga jika memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra yang baik dari masyarakat atas kehadiran organisasi/lembaga lingkungannya. Kegiatan organisasi/lembaga dalam jangka panjang memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, organisasi/lembaga juga merasa dianggap bersama masyarakat dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Akibatnya, lembaga tersebut akan memperoleh tanggapan yang positif dalam menawarkan suatu produk untuk diberikan masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu perbaikan bagi masyarakat.

2) Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh organisasi/lembaga, masyarakat juga dapat mendapat wawasan baru mengenai hubungan organisasi/lembaga dan masyarakat yang selama ini hanya sekadar dipahami sebagai hubungan pemberi layanan/jasa dan masyarakat penerima layanan jasa antara lembaga dan masyarakat saja, sehingga masyarakat memiliki wawasan baru bahwa hubungan antara masyarakat dalam kehidupan bersama perlu diarahkan untuk bekerja sama yang saling menguntungkan. Hubungan masyarakat dalam dunia modern dipahami sebagai hubungan antara pihak dalam melayani jasa dan pihak yang terlayani jasa, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak

hanya sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan dan lain-lain.

3) Manfaat Bagi Pemerintah

Dengan adanya tanggung jawab sosial manfaat bagi pemerintah juga sangatlah jelas. Pemerintah tidak saja berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan organisasi/lembaga bisnis maupun lembaga sosial. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat kepercayaan untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik perlu mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat baru. Tugas pemerintah Sebagian dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga sosial atau organisasi bisnis/perusahaan.

Bagi umat Islam, mendengar kata sedekah tentu bukan hal yang asing. Sedekah sering kita artikan dengan memberi sesuatu yang dimiliki kepada seseorang atau orang-orang, baik dalam bentuk materi maupun non materi diberikan langsung maupun lewat lembaga yang dipercaya seperti BAZNAS. Dengan kita memahami arti sedekah yang sebenarnya, bentuk-bentuk sedekah, manfaat dari sedekah, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan sedekah, maka akan mendorong kita untuk dengan senang hati dan ikhlas memberikan bersedekah kepada orang lain sebagai bentuk ibadah. Hal lain yang berhubungan dengan sedekah misalnya tanggung jawab sosial. Sebagai makhluk sosial pastinya kita tidak dapat lepas dari peran orang lain. Oleh karenanya dalam bersedekah perlu adanya tanggung jawab sosial.

Dalam surat QS. Al-Maidah: 2 “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Dalam al-qur’an dengan jelas dikatakan bahwasannya bagi umat islam dalam melaksanakan tolong menolong tersebut merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Disamping itu islam juga mewajibkan membayar zakat. Perintah melaksanakan zakat tersebut sangat banyak dikarenakan pentingnya fungsi zakat, antara lain dalam surat At-Taubah : 103, yang berbunyi: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan

mensucikan“ (Q.S. At-Taubah : 103).“Bahwasannya semua amal itu tergantung niatnya, dan bahwasannya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya (HR. Bukhari).

Didalam Al-Quran serta hadist diatas memberikan pelajaran bagi umat muslim bahwa seseorang yang melakukan *shodaqoh* adalah seseorang yang memberikan sebagian harta kepada orang lain dilakukan secara sukarela, ikhlas, atau tanpa pamrih, semata-mata untuk mengharap ridho Allah SWT guna menolong atau membantu kesulitan yang tengah dialami oleh orang lain (Muhyidin, 2008: 258). Hal ini mengandung implikasi bahwa dengan *shodakoh* maka seseorang itu telah tumbuh rasa tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitarnya, dengan suatu harapan di samping mendapat ridho Allah mampu menolong orang lain juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan manfaat lain sedekah bagi kehidupan sosial masyarakat diantaranya yaitu terciptanya lapangan kerja, mengurangi angka kriminal, dan memperkuat tali ikatan keluarga dan masyarakat (Maskur, 2011: 5).

Begitu besarnya peran *Shodaqoh* sebagai bentuk merefleksikan rasa tanggung jawab sosial bagi masyarakat sehingga bila para *Muzzaki* yang telah sadar, secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalah jasa dengan penuh ikhlas bersodakoh secara rutin, maka masyarakat sekitarnya dapat diberdayakan untuk mampu menggerakkan lapangan kerja, membantu peningkatan derajat pendidikan meningkatkan derajat kesehatan dan tumbuhnya modal guna berusaha produktif dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

8. Stakeholder

Friedman mendefinisikan *stakeholder* sebagai: “*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.*” Yang berarti sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu (Freeman, 1984: 37). Hal pertama mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini

dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya* (Marzully, 2012: 24).

Pemangku kepentingan atau disebut juga dengan *stakeholder* merupakan pihak yang dapat mempengaruhi maupun menerima dampak dari keputusan yang diambil (Freeman, 1984). Arti lain mengenai *stakeholder* yaitu sebagai masyarakat, baik individual maupun kelompok, yang memiliki legitimasi, kekuasaan, dan kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan (Chandra et al., 2011). Dengan kata lain, para *stakeholder* memiliki peran dan pengaruh yang besar pada keberlangsungan perusahaan.

Premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif (Mardikanto, 2014: 68).

Pentingnya peran *stakeholder* terhadap perusahaan membuat perusahaan perlu melakukan analisis *stakeholder*. Mitchell et al., (1997) dalam Clement (2005: 12) menyatakan bahwa terdapat tiga karakteristik yang menunjukkan seberapa penting suatu *stakeholder* bagi perusahaan, yaitu kekuatan (*power*), urgensi (*urgency*), dan hak kekuasaan (*legitimacy*). Suatu *stakeholder* dianggap mempunyai kekuatan ketika dapat memaksakan kehendaknya dalam hubungan dengan perusahaan. Di sisi lain, urgensi menunjukkan seberapa cepat perusahaan perlu berupaya terkait dengan permintaan atau tindakan *stakeholder*. Sedangkan *stakeholder* memiliki legitimasi ketika tindakannya terhadap perusahaan secara luas dianggap sesuai dengan norma, nilai, dan kepercayaan masyarakat luas. Selanjutnya, (Clement, 2005) mendapatkan kesimpulan dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa analisis terhadap *stakeholder* memegang peranan penting karena kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) maupun kinerja

keuangan perusahaan (*corporate financial performance*) saling mempengaruhi secara positif yang mengindikasikan peran *stakeholder* atas kinerja perusahaan.

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin *powerful stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya* (Yunus, 2014: 74). Sinergisitas antara *stakeholder* sangat penting dalam mendukung terwujudnya program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar yang meliputi berbagai lembaga yaitu pejabat terkait, Pokja STBM, Pimpinan BAZKAR, Pimpinan BANK JATENG, para *muzaki* dan para *mustahiq*.

9. Kebijakan

Selanjutnya tentang pengertian kebijakan banyak sekali definisi yang menjelaskan apa arti kebijakan yang dapat membantu memahami dalam menyoroti masalah yang berkaitan dengan kebijakan. Dari segi bahasa kebijakan berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta "*Polis*" (negara kota) dan *Pur* (kota), kemudian masuk kedalam bahasa Latin menjadi *Politea* (negara) dan dalam perkembangan lebih lanjut akhirnya masuk kedalam bahasa Inggris menjadi *Policie*, yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah politik atau administrasi pemerintahan (Dunn, dalam Muhajir 1990: 10).

Pengertian lain mengenai Kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu keputusan yang siap untuk dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya suatu tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi (Soenarko, 2003: 41). Sedangkan pendapat lain, mengkaitkan dengan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah

publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya, Kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik (Tangkilisan, 2003: 1). Kemudian Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan berbagai halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak dan tujuan tertentu (Soenarko, 2003: 42).

Selanjutnya menurut Dye (1975: 1) menyatakan "*what ever government choose to do or not to do*", artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan merupakan pilihan. Pemerintah memegang peranan penting bukan saja melakukan tindakan tertentu tetapi juga untuk berbuat sesuatu atau menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program sesuatu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, akan tetapi pemerintah seakan-akan hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

Menurut Frederick (dalam Wahab, 1991: 13) kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dengan definisi ini berarti pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan apapun bentuknya dalam merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi, dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari seseorang/kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik yang dihasilkan melalui suatu proses.

Pendapat Richard Rose (dalam Muhadjir, 1998: 109) pengertian kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan dan dibuat oleh badan serta pejabat Pemerintah, diformulasikan didalam bidang-bidang itu sejak pertahanan, energi dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan dan keagamaan. Sedangkan menurut William Dunn

(dalam Muhadjir, 1998: 132). Kebijakan Publik (*Public Policy*): pola ketergantungan yang sangat kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan, lembaga atau kantor Pemerintah.

Dalam penelitian lebih lanjut yang akan dibahas adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Visi Misi Kepala Daerah atau Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Karanganyar yang Visi dan Misinya dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018. Maka dalam penelitian ini akan dikaji secara mendalam bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam bidang kesehatan lingkungan terutama pada pemberdayaan melalui program jambanisasi, apakah proses dalam pengambilan kebijakan ini sudah mendapat legitimasi dari semua komponen termasuk masyarakat terutama dalam pelibatan CSR maupun melalui kinerja BAZKAR.

10. Kajian Efektivitas Kinerja BAZKAR

a. Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja menurut kamus umum, kinerja adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja atau tugas. Kinerja merupakan prestasi kerja atau *performance*, yaitu hasil kerja selama periode tertentu dibanding dengan berbagai kemungkinan. Menurut Simamora (2003: 45-59) kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya; Sedangkan Shadily (1992: 425), mengatakan kinerja atau *performance* adalah berdaya guna prestasi atau hasil.

Selanjutnya Kumorotomo (1996: 49) memberikan batasan pada konsep kinerja organisasi publik setidaknya berkaitan erat dengan efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap, hal ini berarti bahwa *performance* adalah sebuah tindakan yang dapat dilihat, diamati serta dimungkinkan untuk mencapai hal-hal yang diharapkan (tujuan). Kinerja juga dapat dikatakan gabungan dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Untuk mengetahui ukuran kinerja

organisasi maka dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik pegawai melakukan pekerjaan mereka. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang telah dicapai, atau yang dikerjakan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan kerja atau tugas tertentu dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Efektivitas Kinerja dan Pengukurannya

Efektivitas kinerja diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Pendapat ini didukung Danim (2004: 101) yang mengatakan efektivitas kinerja kelompok, berkaitan dengan kemampuan anggota-anggota dalam memilih atau melakukan sesuatu yang tepat demi kepentingan bersama. Efektivitas kinerja akan meningkat apabila seseorang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan kerja. Efektivitas kinerja individu dapat diukur melalui keterampilan kerja, peningkatan prestasi, kemampuan untuk beradaptasi, dan kemampuan dalam menghadapi perubahan (Bass dan Bernard, 2006).

Tentang kinerja, Timpe (2001: 57) mengungkapkan kinerja yang baik dari individu akan menggambarkan kinerja organisasi, kinerja individu sangat dipengaruhi oleh kinerja organisasi atau perusahaan. Kinerja organisasi menjadi buruk apabila individu berkemampuan rendah dan upaya pengembangan keterampilan dan keahliannya juga rendah. Sebaliknya, kinerja yang baik dari seseorang akan mampu meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Dari definisi-definisi tersebut, maka efektivitas kinerja dapat dijelaskan sebagai kemampuan dalam melakukan sesuatu yang tepat didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Pelaksanaan suatu program telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan menunjukkan efektivitas program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya, ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan tujuan yang ditetapkan memperlihatkan program yang dilaksanakan belum efektif.

Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada; 1) kualitas: kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas

mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut; 2) penilaian oleh pihak luar: penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

c. Penilaian Kinerja

Menurut Gibson, metode penilaian kinerja terdiri dari beberapa indikator, antara lain: 1) metode skala penilaian grafik: metode skala penilaian grafik skala yang mendaftarkan sejumlah ciri dan kisaran kinerja untuk masing-masing pegawai kemudian dinilai dengan mengidentifikasi skor yang paling baik menggambarkan tingkat kinerja untuk masing-masing ciri; 2) metode skala penilaian perilaku: metode skala penilaian perilaku merupakan suatu metode penilaian yang bertujuan mengkombinasikan manfaat dari insiden kritis dan penilaian berdasarkan kuantitas dengan menjangkau skala berdasarkan kuantitas pada contoh-contoh spesifik dari kinerja yang baik dan jelek; 3) metode manajemen: berdasarkan sasaran metode ini meliputi penetapan tujuan khusus yang dapat diukur bersama dengan masing-masing pegawai dan selanjutnya secara berkala meninjau kemajuan yang dicapai.

Didalam buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, penilaian kerja adalah salah satu tahapan penting dalam siklus pembangunan sumber daya manusia, baik di sektor publik maupun swasta. Penilaian kinerja ini merupakan proses pengukuran terhadap tingkat penyelesaian (*degree of completion*) tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai selama masa tertentu dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan karakteristik tugas tersebut. Selanjutnya agar dapat menghasilkan penilaian kinerja yang *valid* dan *readible*, maka perlu adanya instrumen pengukuran kinerja sebagai alat yang dipakai untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai.

Substansi instrumen pengukuran kinerja ini terdiri dari aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan dapat diukur, yaitu meliputi:

1) prestasi kerja (*achievement*) yaitu hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja; 2) keahlian (*skill*) yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan padanya; 3) perilaku (*attitude*) yaitu sikap atau tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam tugas-tugasnya. perilaku disini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin; 4) kepemimpinan (*leadership*) merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk dalam hal pengawasan.

Melalui beberapa pengertian dan kajian tentang efektivitas kinerja BAZKAR, pada penelitian ini peneliti menggunakan kriteria pengukuran efektivitas kinerja BAZKAR sejalan dengan teori yang dikemukakan Steers dalam Tangkilisan (2005: 141) bahwa pengukuran efektivitas kinerja organisasi meliputi 5 (lima) kriteria, yaitu: Produktivitas kerja, Kemampuan adaptasi kerja, Kepuasan kerja, Kemampuan berlaba, Pencarian sumber daya. Dengan menggunakan teori ini diharapkan peneliti dapat mengukur tingkat efektivitas. Efektivitas kinerja BAZKAR apakah sudah memenuhi kelima unsur tersebut dalam membantu kebijakan pemerintah pada program jambanisasi masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat dan CSR BANK JATENG di Kabupaten Karanganyar.

d. Kajian Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Perjalanan dan perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia awalnya dimulai dengan terbentuknya badan atau lembaga pengelola amil zakat yang telah dilembagakan bernama Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Implementasi pengelolaan dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian untuk kebutuhan konsumtif, namun pada pelaksanaan yang lebih baru saat ini zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif, sebagaimana yang dicanangkan dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan urusan Haji Kementerian Agama.

Dari sekian banyak institusi lokal beserta potensi dan karakteristiknya, menurut Etzioni (1982: 3), organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan lebih unggul dan efektif dibandingkan institusi sosial lainnya karena memiliki

karakteristik khas, yaitu pertama, organisasi keagamaan secara khusus tidak dibentuk untuk mencari keuntungan, apalagi keuntungan finansial. Kedua, organisasi sosial keagamaan menempati posisi di luar wilayah organisasi pemerintah. Ketiga, dalam aktivitasnya ia memusatkan pada tercapainya kepentingan kolektif. Keempat, keanggotaannya bersifat masif.

Karakteristik yang pertama dan kedua menjadi determinan penting bagi efektivitas tindakan kolektif pada institusi ini. Sifatnya yang *non-profit oriented* dan berada di luar campur-tangan pemerintah menjadi modal berharga untuk menarik kepercayaan masyarakat yang berimplikasi pada mengalirnya dukungan bagi institusi sosial. Dengan berada di luar “sistem” pemerintah, institusi sosial dapat leluasa bergerak tanpa harus dikontrol dan bahkan dimonopoli oleh pemerintah. Kelebihan-kelebihan itulah yang menjadi daya tarik dan potensi besar institusi sosial untuk digunakan sebagai media penguatan kapasitas dan posisi tawar masyarakat serta memperjuangkan kepentingannya.

Sebagai bagian dari institusi lokal, komunitas keagamaan menjadi sarana penting untuk memberdayakan serta meningkatkan kapasitas dan posisi tawar masyarakat. Todd dan Allen menjelaskan bahwa komunitas keagamaan, dalam hal ini adalah *religious congregations*, mampu membangun keadilan sosial. Menurut hasil penelitian mereka, kongregasi (jamaah) yang menghubungkan modal sosial masyarakat melekat dengan pengarus-utamaan keadilan. Aspek spesifik dari *setting* kongregasi (misalnya, orientasi teologis) sangat penting bagi pengutamaan individu dan partisipasinya terhadap aktivitas keadilan sosial. Ikatan sosial yang terbentuk atas dasar nilai teologis mendorong kepedulian sosial yang tinggi termasuk juga pada ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Sehingga menjadi beralasan jika komunitas keagamaan dijadikan garda depan dalam mengembangkan dan melindungi masyarakat dari ekspansi struktur makro untuk menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam hal ini adalah menciptakan pelayanan kesehatan yang berkeadilan sosial.

Untuk pendayagunaan dana zakat berbentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut: 1) distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat *commit to user* dibagikan pada *mustahiq* untuk dimanfaatkan

secara langsung yaitu, zakat fitrah yang diberikan pada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat mal yang dibagikan pada para korban bencana alam; 2) distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa; 3) distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir-miskin; 4) distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil (Mufraini. 2012: 153-154).

Selanjutnya tugas BAZNAS dalam menyalurkan zakat profesi adalah menempatkan Pegawai Negeri sebagai subjek zakat, sedang penghimpunan dan penyaluran zakat yang selalu didasari atas legislasi dan regulasi pada hakikatnya adalah menempatkan Pegawai Negeri sebagai subjek. Pegawai sebagai subjek dalam pembayaran zakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia yang lain, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kalangan ekonomi lemah. Selain itu Pegawai sebagai subjek dalam pembayaran zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) juga bisa menjadi sarana mediasi hubungan antara *muzaki* dan *mustahiq* bagaimana keabsahan zakat dari *muzzaki* untuk memperoleh ganjaran atau pahala dan bagaimana para *mustahiq* dapat menerima hak dengan benar sesuai tuntunan hukum syariah islam.

Demikian BAZNAS Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga sekaligus jembatan untuk memperoleh ganjaran, tentu orang yang terlibat didalam kepengurusan BAZNAS harus membuat sesuatu yang menyebabkan Pegawai dan para *muzzaki* tertarik dalam menjalankan zakat profesi, sehingga memunculkan ganjaran. Maka upaya sosialisasi dalam bentuk ceramah atau khutbah, seminar, diskusi, pemanfaatan berbagai media dan pendekatan langsung diberbagai instansi secara terus menerus agar membuat mereka tertarik melakukan pembayaran zakat adalah wujud konkret dari ganjaran tersebut.

Untuk mengimplementasikan pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam yaitu; amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Maka BAZNAS Karanganyar (BAZKAR) menjalankan lima program yang meliputi: 1) Karanganyar Peduli (Kemanusiaan): Bantuan fakir miskin, ghorim, bantuan sosial, bantuan bedah rumah fakir miskin, bantuan bencana; 2) Karanganyar Sehat (Kesehatan): Pengobatan poli gratis, ambulance gratis, bantuan operasi bibir sumbing, bantuan operasi katarak, bantuan penyembuhan HIV, bantuan fakir miskin; 3) Karanganyar Cerdas (Pendidikan): Bantuan Beasiswa anak sekolah dan mahasiswa, bantuan sekolah, madrasah, ponpes, bantuan sekolah tilawah, bantuan TPA/TPQ, pelatihan khusus, pelatihan dai khotib, pelatihan manajemen masjid, pelatihan guru TPA/TPQ; 4) Karanganyar Makmur (Bantuan Ekonomi): Bantuan desa barokah, bantuan pinjaman mesin jahit tas, bantuan wirausaha kecil, modal usaha, gaduh ternak sapi, bantuan ternak kambing, bantuan usaha mandiri; 5) Karanganyar Taqwa (Siyar Islam): Bantuan fisik tempat ibadah, bantuan dai *mubaligh*, bantuan TPQ, bantuan kegiatan keagamaan, sertifikasi wakaf, sosialisasi halal, siaran dakwah PHBI, khataman, kaligrafi jalan raya di sepanjang jalan lawu dan di jalan menuju objek wisata, dan lain-lain.

BAZKAR dalam mengemban tugas sebagai penghimpunan dan penyalur zakat melalui programnya dengan memfungsikan lembaga zakat secara efektif melalui sistem yang telah mapan dan membentuk beberapa UPZ di setiap Instansi pemerintah maupun pada unit-unit Perusahaan Daerah, serta di beberapa UPZ ditingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Karanganyar sehingga menjadikan zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, yang penyalurannya di tentukan sesuai program terutama untuk masyarakat miskin. Selanjutnya masalah ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas pasar modal yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang semula *mustahiq* menjadi *muzaki* (Siswanto, 1995: 222).

Berarti bahwa modal yang dikembalikan oleh *mustahiq* pada lembaga zakat tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si

mustahiq yang diberikan pinjaman tersebut. Hal itu berarti biar saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi hak pada *mustahiq* tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Kalaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan pada *mustahiq* lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi *mustahiq* untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas *mustahiq*-nya. Untuk mengkaji program BAZKAR maka akan dilihat apakah efektivitas kinerja BAZKAR telah mampu membantu kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan kesehatan gratis melalui program jambanisasi masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

e. Hubungan kerja BAZKAR dengan *Muzzaki* dan *Mustahiq*

Pengertian kerja sama berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Cooperate*”, “*Cooperasion*”, atau “*Cooperative*”. Berarti dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kerja sama atau bekerja sama. Adapun pengertian kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, lembaga non pemerintah) untuk mencapai tujuan bersama. Hafsah, (2000: 43) menyebut kerja sama dengan istilah “kemitraan”, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Pengertian lain dari kerja sama adalah suatu perbuatan bantu-membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama (Wursanto, 2005: 54).

Tujuan daripada orang-orang melakukan kerja sama ialah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama mereka dalam suatu organisasi atau lembaga. Agar orang-orang yang bekerjasama itu dapat mencapai tujuan maka perlu adanya hubungan yang baik, yaitu hubungan yang dilakukan oleh orang-orang dalam usaha guna mencapai tujuan bersama, hal ini sering disebut sebagai hubungan kerja. Dengan demikian dalam kerja sama paling tidak terdapat dua unsur, yaitu tujuan bersama dan hubungan kerja. Lebih lanjut Anita Lie (2005: 28) mengemukakan bahwa kerjasama merupakan hal yang sangat penting

dan diperlukan dalam kelangsungan hidup manusia. Dalam hal yang demikian maka dalam suatu hubungan kerja sama itu tanpa adanya kerjasama tidak akan ada suatu keluarga, organisasi, ataupun kinerja, khususnya tidak akan berlangsung kinerja organisasi maupun program pemerintah.

Dari berbagai pengertian dan landasan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya seorang bekerja sama karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dorongan keinginan pada diri seseorang dengan orang yang lain berbeda, sehingga perilaku manusia cenderung beragam, hal demikian menimbulkan bentuk-bentuk kegiatan yang dikehendaki didalam bekerja. Motivasi hubungan kerja sama merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan lingkungan kerja sama yang terdapat diantara organisasi-organisasi atau antar lembaga. Keberhasilan dan kegagalan hubungan kerja sama memang sering dikaitkan dengan motivasi dalam hubungan kerja sama. Pada dasarnya manusia selalu menginginkan hal yang baik-baik saja, sehingga daya pendorong atau penggerak yang memotivasi semangat kerjanya atau bekerja sama tergantung dari tujuan dan harapan yang akan diperoleh mendatang jika harapan itu menjadi kenyataan maka seseorang akan cenderung meningkatkan motivasi kerjanya.

Dalam rangka mengkaji hubungan kerja sama antara BAZKAR selaku pengelola dana ZIS, *Muzzaki* selaku penyeter dana ZIS dan apabila interaksi mekanisme hubungan kerja terus berlangsung di antara anggota *Muzzaki* dengan BAZKAR maka dalam pola ineraksi hubungan kerja sama tersebut akan saling membantu, saling mendukung, saling menerima, saling bergantung, dan saling memotivasi satu sama lain untuk berkembang dan berkelanjutan. Motivasi yang terbangun dengan mudah akan meningkatkan hubungan yang saling membutuhkan, karena para *Muzzaki* mempunyai kepentingan yang sama yaitu melalui penyeteran dana ZIS sebagai kewajiban menjalankan syariat islam bertujuan agar dana yang disetorkan lewat BAZKAR akan dapat membantu kesejahteraan masyarakat dan disalurkan sesuai syariat islam.

Disatu sisi BAZKAR mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjalankan amanah sesuai pula dengan syariat Islam, yaitu menyalurkan dengan berlandaskan pada 8 golongan/ashnaf. Di sini tumbuh komitmen bersama untuk

berkembang, sehingga mereka akan berupaya untuk saling berkoordinasi dan saling berkomunikasi dalam rangka lebih mengenal, memahami hasil hubungan kerja sama yang diperkenalkan pada mereka. Setiap orang atau kelompok masyarakat selalu saja ada orang yang lebih dahulu memiliki informasi teknologi baru bahkan lebih maju yang bisa disebut sebagai perintis atau pelopor (Arintadisastra, 1997: 118).

Dalam penelitian ini maka yang dimaksud BAZKAR adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan ketentuan yang baru tersebut BAZKAR dibentuk secara struktural dengan keputusan Bupati Karanganyar setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan BAZNAS Pusat, sesuai dengan ketentuan BAZNAS Kabupaten dipimpin oleh enam pimpinan secara kolektif dengan ditunjuk seorang dari salah satunya pimpinan sebagai Ketua dan dibantu dengan unsur Sekretariat BAZNAS Kabupaten.

Tugas BAZKAR sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang berada di Kabupaten Karanganyar. Terus melakukan kegiatan penghimpunan dana ZIS dengan menjalin hubungan kerja sama antara para penyetor dana ZIS atau *Muzzaki* dengan sistem kerja dituangkan dalam program kinerja BAZKAR. Adapun masyarakat penyetor dana ZIS di Kabupaten Karanganyar terdiri dari para PNS, TNI, POLRI, pegawai BUMD, karyawan perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lainnya.

Dalam pengertian syariat Islam orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan *Mustahiq* zakat. Kata asal *Mustahiq* yaitu *haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. *Mustahiq isim fail* dari *istihaqo yastahiqqu, istihqoq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak. *Mustahiq* zakat itu ada 8 *ashnaf* atau golongan, itu ditunjukkan dalam ayat al quran berikut ini:

"Zakat-zakat itu tiada lain, kecuali untuk orang-orang fakir, miskin, *'amilin*, yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk keperluan di jalan Alloh, dan orang-orang yang safar (bepergian) kehabisan bekal, yang demikian itu suatu kewajiban dari Alloh, karena Alloh itu maha mengetahui lagi maha bijaksana". (Q.S. At-Taubah: 60).

Sesuai dengan ayat di atas, maka jelas bahwa orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang-orang yang disebut didalam ayat tersebut yang meliputi:

- 1) *Fakir*, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan dan usaha atau orang yang memiliki harta, pekerjaan, dan usaha, tetapi hasilnya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir adalah orang yang hidup materialnya sangat kurang. Orang fakir itu, baik ia menyatakan maupun tidak dinyatakan kesulitan hidupnya, diketahui oleh umum. (Abidin dan Suyono, 1998: 226)
- 2) *Miskin*, yaitu orang yang mempunyai harta, usaha, dan pekerjaan, tetapi hasilnya masih belum mencukupi keperluan hidupnya, namun tidak kekurangan seperti orang fakir. Oleh karena itu, orang miskin jarang menampakkan kekurangan hidupnya dari segi material, sehingga kadang-kadang tidak diketahui orang bahwa orang tersebut itu miskin,
- 3) *Amilin*, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak. *Amilin* atau panitia zakat itu berhak mendapat bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jasa tugas mereka.
- 4) *Mualaf*, yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imannya masih lemah. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa mualaf itu ada 4 golongan: 1) orang-orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah. mereka diberi zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya; 2) orang islam yang berpengaruh yang diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir untuk masuk islam; 3) orang islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, yang dengan pengaruhnya kaum muslimin dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir; 4) orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau anti zakat (Abidin dan Suyono, 1998: 227).
- 5) *Fi al-Riqab*, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan merdeka. Maksud *al-Riqab* di sini adalah para budak yang *mukatab*, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian *kitabah* secara sah dengan tuan-tuannya, tetapi tidak mampu

membayarinya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya, (Lahmuddin, 1995: 178).

- 6) *Gharim*, yaitu orang-orang yang berhutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum. Menurut Iman Syafi'i, golongan *Al-Gharim* ada 3 macam: 1) Orang yang berhutang untuk mengurangi biaya mendamaikan antara orang-orang yang berselisih; 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat bagian zakat bila ia tidak mampu lagi membayar (Abidin dan Suyono, 1998: 227); 3) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, (Lahmuddin 1995: 178).
- 7) *Fi Sabilillah*, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. *Sabilillah* ini meliputi kepentingan agama Islam dan umatnya. Orang yang berperang membela dan menegakkan kalimat Allah, mendapat bagian zakat bila tidak digaji, atau tentara sukarela walaupun ia orang kaya, diberikan zakat itu untuk sekedar biaya perang.
- 8) *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang, atau akan, melakukan perjalanan (*musafir*). Orang musafir dapat diberi dari zakat, dengan syarat: 1) perjalanan itu tidak ditujukan untuk maksiat. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak mendapat zakat. Menurut pendapat yang *sahih*, orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang mubah pun dapat diberikan bagian zakat, sebagaimana ia berhak mendapat *rukhsah* seperti berbuka puasa dan mengqashar shalat; 2) ia kehabisan bekal, tidak mempunyai, atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain (Lahmuddin, 1995: 179-180).

Dari pemahaman di atas, *Mustahiq* dapat disimpulkan dari 8 golongan masyarakat tersebut sebagai kelompok sosial yang ada didalam kehidupan masyarakat yang menurut pengertian sosiologis adalah kumpulan individu-individu yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, didalamnya terdapat ikatan perasaan yang relatif sama. Kemudian dalam mempelajari kelompok manusia secara sosiologis, tentu banyak variasi yang perlu diperhitungkan seperti kuantitas keanggotaan, aktivitas anggota kelompok, hubungan-hubungan antar individu, faktor pengikat para anggotanya,

kepentingan-kepentingan, saling ketergantungan, dan ukuran-ukuran perilaku atau norma-norma yang sama-sama dipatuhi. Mayor Polak (1979: 144) mendefinisikan kelompok sebagai “Group atau kelompok”, yaitu sejumlah orang yang ada antar hubungan satu sama lain dan antar hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. Pendapat tersebut pada dasarnya ingin menjelaskan bahwa betapa pentingnya faktor hubungan atau interaksi dalam suatu kelompok sosial, karena sekumpulan orang tanpa ikatan hubungan satu sama lain belum dapat disebut sebagai kelompok. Begitu juga dengan terbentuknya suatu kelompok sangat tergantung pada perkembangan jalinan hubungan antara individu-individu sebagai anggotanya. Dalam sosiologi, kelompok merupakan organisasi dari dua atau lebih yang bersatu atas dasar ikatan-ikatan ketergantungan masing-masing dengan standar ukuran perilaku yang relatif sama.

Melalui kajian ini diharapkan hubungan kerja antara BAZKAR dengan *Mustahiq* terjadi melalui interaksi yang intensif sehingga masing-masing memiliki kesamaan tujuan, saling membantu saling mendukung, dan tumbuh dorongan semangat untuk maju, berkembang dan berkelanjutan. Dalam interaksi ini keduanya memiliki kepentingan yang sama, yaitu melalui penghimpunan dan penyaluran dana ZIS BAZKAR dapat menjalankan program dan kinerjanya dan selalu terdorong untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan hubungan baik dengan para *Mustahiq* sebagai penerima manfaat dalam bentuk keberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Di sisi lain, *Mustahiq* memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial dan keagamaan bahkan lebih dari itu ingin menjadi masyarakat yang mampu mandiri melalui keberdayaan yang dikembangkan oleh BAZKAR. Dalam interaksi pembinaan inilah terjadi motivasi hubungan kerjasama yang sering dijumpai pada masyarakat pedesaan di Indonesia, yaitu lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah termotivasi untuk melakukan hubungan kerjasama dengan masyarakat pedesaan yang secara kultural dan historis memiliki jiwa gotong royong dan kerjasama.

f. Implementasi Pemberdayaan Melalui Kinerja BAZKAR

1) Pengertian Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kemudian menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014: 8) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *“implementation”*, berasal dari kata kerja *“to implement”*, kata *to implement* berasal dari bahasa latin *“implementatum”* dari asal kata *“impere”* dimaksudkan *“to fill up”*, *“to fill in”* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *“plere”* maksudnya *“to fill”*, yaitu mengisi. Selanjutnya kata *“to implement”* dimaksudkan sebagai: *“(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Tentang pengertian implementasi terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Pengertian implementasi secara lengkap dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015: 12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut untuk menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Pengertian implementasi

menurut Lister dalam Taufiq dan Isril, (2013: 136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Selanjutnya Mulyadi, (2015: 47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum suatu tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Sedangkan Horn dalam Tahir, (2014: 55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam kebijakan. Pendapat Ekawati (Taufiq dan Isril, 2013: 136) menyatakan bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan yang berlangsung terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Widodo (Syahida, 2014: 10), implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Naditya et al., (2013: 108) menyatakan, dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Sedangkan menurut Wahyu dalam Mulyadi, (2015: 50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, maka tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Pada dasarnya implementasi menurut Syauckani et al., dalam (Pratama, 2015: 229), merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan tujuan jangka panjang.

Sedangkan William (Taufiq dan Isril, 2013: 136) dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit

organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Waluyo, (2007: 49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi dalam penelitian ini merupakan suatu proses yang berkaitan langsung dengan suatu kebijakan dan program-program yang akan diterapkan melalui kinerja BAZNAS Karanganyar (BAZKAR) yang sejalan dengan kebijakan pemerintah terutama dalam mempercepat akses sanitasi lingkungan untuk program jambanisasi masyarakat dengan pemanfaatan dana Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui APBD, dana ZIS melalui kinerja BAZKAR dan dana CSR melalui peran BANK JATENG. Untuk mendukung program-program jambanisasi tersebut, maka guna mencapai tujuan kinerja BAZKAR dalam pemberdayaan melalui jambanisasi akan dilihat bagaimann prosesnya dan bagaimana indikator pengukurannya.

2) Proses Implementasi

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman dari apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dari sisi praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan adapun proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan Mulyadi (2015: 13), yakni: Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak; Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana; Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Selanjutnya didalam proses persiapan suatu implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: Penyiapan sumber daya, unit dan metode; Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan; Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Selanjutnya Syukur dalam Surmayadi (2005: 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; 2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan; 3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi.

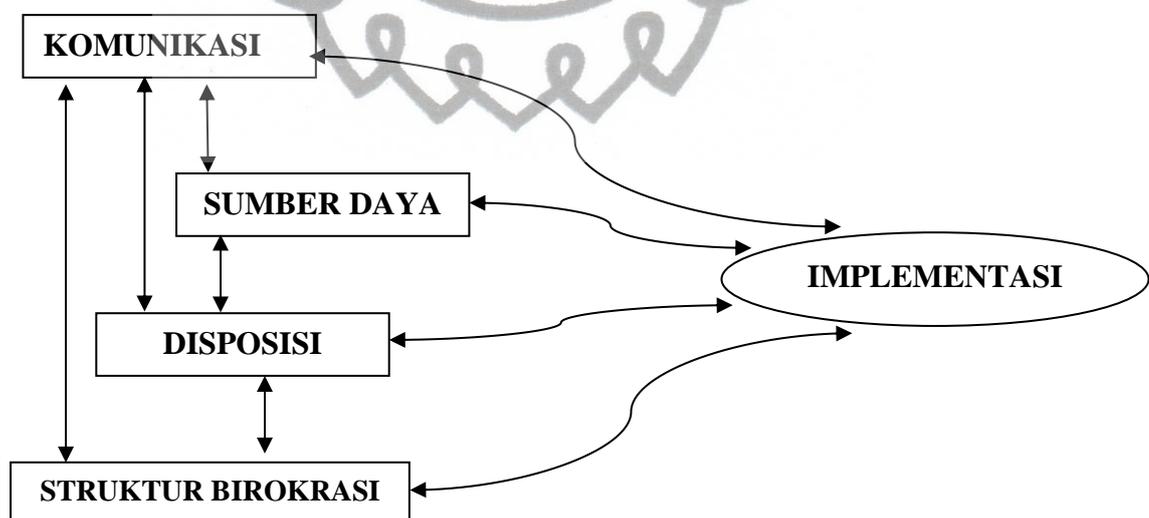
Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku bagi kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai *implementor*, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, seperti sanitasi berkelanjutan melalui program jambanisasi keluarga, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan Pokja serta pendamping, agar keberhasilan implementasi kebijakan dapat dicapai dan diterima oleh masyarakat/kelompok sasaran.

3) Indikator Implementasi

Dalam rangka menentukan tolok ukur maupun indikator suatu kebijakan maupun kinerja organisasi Kapioru (2014: 105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: Kondisi lingkungan (*environmental conditions*), Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*), Sumberdaya (*resources*), Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*). Tentang implementasi menurut Purwanto dalam Syahida, (2014: 13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu: Kualitas kebijakan itu sendiri;

Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran); Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya); Kapasitas *implementor* (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya); Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak); Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Lebih lanjut Subarsono menyatakan bahwa tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan berada pada tahap implementasi atau pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis termasuk didalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan dipengaruhi berbagai unsur baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, termasuk unsur lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Hal yang perlu diwaspadai yaitu dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan. Berdasarkan teori George C. Edwards III (AG. Subarsono, 2008: 90-92), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:



Gambar 2.2 Model Implementasi Kinerja BAZNAS

Sumber: AG. Subarsono (2008: 91)

- a) Komunikasi: Proses komunikasi efektif diperlukan dalam kerangka pelaksanaan kinerja BAZKAR. Ketua BAZKAR harus mengkomunikasikan kebijakan yang akan dilaksanakan kepada para pimpinan BAZKAR dan para

Stakeholders agar berkomunikasi secara baik sehingga dapat memahami maksud dan tujuan kinerja BAZKAR dalam pemberdayaan melalui program jambanisasi. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi dan integrasi. Komunikasi antar komponen pelaksana program jambanisasi perlu dilakukan secara intensif agar kinerjanya dapat optimal.

- b) Sumber Daya: Betapapun jelasnya proses komunikasi kinerja kepada pelaksana kinerja BAZKAR dan betapapun perintah dan kewenangan sudah diberikan tetapi kalau sumber daya yang tersedia tidak mendukung hal ini dapat menghambat pelaksana kebijakan. Adapun pentingnya masalah sumber daya dalam pelaksanaan program jambanisasi mencakup: Tim POKJA Jambanisasi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan pendamping program serta peran CSR yang telah dibentuk melalui kebijakan Bupati Karanganyar. Semua dilibatkan secara aktif informasi dari para masyarakat penerima manfaat (*mustahiq*) akan sangat membantu dalam melaksanakan program.
- c) Disposisi: merupakan watak dan karakteristik sumber daya manusia yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Dalam pemberdayaan kinerja BAZKAR, jika implementor Pimpinan BAZKAR memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam program jambanisasi, maka apabila Pimpinan BAZKAR memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan program jambanisasi dalam hal ini Bupati, maka proses implementasi kinerja BAZKAR juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi: Dalam pelaksanaan kinerja BAZKAR melibatkan banyak orang, bidang dan lingkungan sehingga dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan kebijakan. Masalah koordinasi antar struktur birokrasi dapat menjadi penghambat pelaksanaan kinerja, ntuk itu diperlukan sebuah prosedur tetap atau *standard operational procedure* (SOP) atau proses untuk kelancaran kinerja BAZKAR.

11. Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Model Pemberdayaan

Kata "model" diturunkan dari bahasa latin *mold* (cetakan) atau *pettern* (pola). Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena dari sistem yang sebenarnya. Model dapat juga merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah (Mahmud Achmad, 2008: 1).

Menurut Mahmud Achmad (2008: 2) bahwa bentuk model secara umum ada empat, yaitu model sistem, model mental, model verbal, dan model matematika. Model sistem adalah alat yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sistem tanpa melakukan percobaan. Model mental adalah model-model untuk sistem teknik yang berdasarkan pada pengalaman dan perasaan. Model verbal adalah sebuah model perilaku sistem pada kondisi yang berbeda dideskripsikan dengan kata-kata. Sedangkan yang dimaksud dengan model matematika yaitu bilamana kita menghubungkan antara besaran jarak, arus, aliran pengangguran dan lain, yang dapat kita amati pada system dideskripsikan sebagai hubungan matematika dalam model (Sarliaji Cayaray, 2014: 1).

Tentang pemberdayaan secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (2). Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Dalam kaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang membahas hal ini. Salah satunya adalah Payne, yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang ia lakukan yang terkait dengan diri mereka masing-masing, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui proses dan fase percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya (Rukminto Adi, 2008: 136).

Sebagaimana dikutip oleh Alfitri, menurut Craig dan Mayo konsep pemberdayaan masyarakat terdiri unsur kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan pemerataan (Alfitri, 2011: 22). Konsep ini memiliki cakupan luas tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut namun juga mencakup pengembangan secara keseluruhan, mulai dari aspek manusia, aspek sosial dan aspek ekonomi. Pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto paling tidak memiliki empat hal, yaitu kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan program peningkatan kapasitas (M. Anwas, 2003: 50).

Didalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Dari berbagai pandangan tersebut terlihat jelas bahwa konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. Maka diambil

rumusan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan rancangan pembangunan melalui proses pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang melibatkan seluruh pihak untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat di berbagai bidang (M. Anwas, 2003: 52-54).

Dengan demikian, target dan tujuan itu sendiri dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang digarap. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan di bidang pendidikan ataupun bidang sosial. Misalnya, tujuan pemberdayaan bidang ekonomi tidak lain adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola suatu usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus (M. Anwas, 2003: 52-54). Maka hal yang sangat penting dalam proses pemberdayaan yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memahami hal-hal dan tanggung jawab secara politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar memiliki keberdayaan dalam menghadapi segala persoalan yang ada.

Menurut Ndraha, ada berbagai macam bentuk program pemberdayaan, di antaranya (Ndraha Taliziduhu, 2003: 132): 1) pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah terhadap pemerintah. hal ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain; 2) pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui investasi sumber daya manusia (*human investmen*) guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan, dan perakuan yang adil terhadap manusia; 3) pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan agar pihak yang diperintah dan lingkungan mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

b. Tujuan Model Pemberdayaan

Tujuan utama model pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (adanya ketidakadilan

dalam struktur sosial). Tujuan utama model pemberdayaan ini adalah untuk menunjukkan atau mengarahkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka bisa memiliki jamban keluarga sebagai kekuatan atau kemampuan dalam hal (Suharto 2007: 58), antara lain: Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan; Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Sumodingrat (2009: 7), yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi sosial maupun ekonomi, maka pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama. Jim Ife (1995: 56) mengungkapkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). Payne dalam Adi (2003: 54) mengemukakan bahwa: “Proses pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu *klien* memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri masing-masing, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya”.

c. Strategi Model Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu strategi agar penerapan model pemberdayaan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu strategi yang tidak umum dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Menurut Sumodiningrat (2009: 106), pendampingan merupakan kegiatan yang dianggap mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan

dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan masyarakat yang sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping untuk memposisikan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator.

Menurut Jim Ife (1995: 63) ada 3 strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- 1) Perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*): untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan guna peningkatan taraf kehidupannya. Perencanaan dan kebijakan yang berpihak dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan. Misalnya : kebijakan membuka peluang kerja yang luas
- 2) Aksi sosial dan politik (sosial dan *political action*): diartikan agar sistem politik yang tertutup diubah sehingga memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif. Adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang dalam memperoleh kondisi keberdayaan.
- 3) Peningkatan kesadaran dan pendidikan: masyarakat/kelompok masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan diperparah dengan tidak memiliki *skill* untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini peningkatan kesadaran dan pendidikan sangatlah penting untuk ditrapkan. Contoh: memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana struktur penindasan terjadi, memberi sarana dan *skill* agar dapat mencapai perubahan secara efektif.

d. Indikator Model Pemberdayaan

Sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan

kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan didalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). indikator keberdayaan, meliputi (Suharto, 2017: 23):

- 1) Kebebasan mobilitas: kemampuan seseorang untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Seperti ke pasar, fasilitas medis, ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, gula, minyak goreng dan bumbu dapur); kebutuhan pribadi (sabun, sampo, bedak, parfum). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika mereka masing-masing dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. Seperti televisi, handphone, lemari pakaian, kulkas. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika mereka masing-masing dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika dia membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga. Misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian tanah, memperoleh kredit usaha.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- 6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan; anggota DPRD setempat; nama Bupati/Wali Kota; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seorang dianggap berdaya, jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan

protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarga; gaji yang tidak dibagi; penyalahgunaan bantuan sosial.

- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan.

Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika dia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya. Tentang indikator pemberdayaan Nugroho (2008: 165-166) mengemukakan, indikator pemberdayaan yaitu; Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif didalam lingkungan; Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut; Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut; Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Untuk mengkaji model pemberdayaan pada program jambanisasi maka dapat dilihat bentuk koordinasi dan upaya menggerakkan masyarakat melalui proses dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dengan mengaitkan hasil kebijakan pemerintah dalam program jambanisasi melalui pemberdayaan masyarakat yang belum memiliki jamban sehat, itu semua tentu berdampak terhadap keberlangsungan program, yaitu mengenai pemberdayaan bagi para *mustahiq*. Berdasarkan hal tersebut Suharto (2005: 68-69) mendefinisikan lima jenis kebutuhan sebagai ukuran dalam suatu program, yakni:

- 1) Kebutuhan *absolute*: kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat mempertahankan hidupnya. Dalam program pengembangan jambanisasi hal ini terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi. Program jambanisasi memberikan dampak positif yang dirasakan masyarakat terutama dari kondisi ekonomi menengah kebawah.
- 2) Kebutuhan *normative*: kebutuhan yang didefinisikan oleh para ahli atau tenaga professional kebutuhan ini biasanya didasarkan standar tertentu. Dalam program jambanisasi hal ini terkait dengan kebutuhan *normative* petani berhubungan dengan keberpihakan masyarakat terhadap pemerintah.

- 3) Kebutuhan yang dirasakan: sesuatu yang dianggap atau dirasakan orang sebagai kebutuhannya. Kebutuhan ini merupakan petunjuk tentang kebutuhan yang nyata, kebutuhan ini berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Hal ini tergantung pada persepsi orang yang bersangkutan mengenai sesuatu yang diinginkan pada satu waktu tertentu.
- 4) Kebutuhan yang dinyatakan: kebutuhan yang dirasakan yang diubah menjadi kebutuhan berdasarkan banyaknya permintaan. Besarnya kebutuhan ini tergantung pada seberapa banyak orang yang memerlukan pelayanan sosial. Berikut adalah kebutuhan yang dinyatakan terkait dengan pemenuhan fasilitas sanitasi (jamban) dalam menjalankan kehidupan sosialnya.
- 5) Kebutuhan komparatif: kesenjangan (*gap*) antara tingkat pelayanan yang ada di wilayah-wilayah yang berbeda untuk kelompok orang yang memiliki karakteristik sama.

e. Model Kerja Bareng dan Komitmen Pimpinan

Awal penelitian tentang Kinerja BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat melalui program jambanisasi telah ada penerapan strategi pemberdayaan masyarakat melalui Model “kerja bareng” sebagai inovasi pengembangan model pemberdayaan dan sekaligus adanya inovasi strategi komitmen pimpinan dalam percepatan program jambanisasi secara teoritis dapat digambarkan sebagai berikut.

1) Model Kerja Bareng dalam Program Jambanisasi di Kabupaten Karanganyar

Kinerja BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam membantu program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar dilandasi oleh adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 132 Tahun 2013, Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Minimal 1 desa *Open Defecation Free* (ODF) per puskesmas setiap tahun. Program Jambanisasi sebagai salah satu pilar dari Pelaksanaan Pamsimas di Kabupaten Karanganyar telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi. Fakta awal penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2008 sampai awal tahun 2013, akses sarana air minum yang dibangun melalui Pamsimas berkontribusi sebesar 23% terhadap keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar.

Dari hasil kunjungan lapangan ke 3 (tiga) lokasi Pamsimas yang dilakukan Bank Dunia dengan didampingi Kementerian Pekerjaan Umum, Kemendagri, Bappenas, dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada 2-3 Mei 2013 terdapat beberapa catatan pelaksanaan Pamsimas. Salah satunya seperti, masih adanya rumah tangga yang sudah memiliki jamban namun mengalirkan air limbahnya ke sungai. Dengan demikian, meskipun terdapat peningkatan sarana sanitasi, desa tersebut belum terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Selain itu, ada juga desa yang tidak ditemukan dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM)-nya. Padahal, keberadaan dokumen tersebut sangat penting untuk mengamankan penyediaan air minum di desa setempat, terutama RKM sebagai panduan dasar bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun air minum dan sanitasi, (Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, Laporan dihadapan Tim Bank Dunia di Kabupaten Karanganyar 2 Mei 2013).

Guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 132 Tahun 2013, maka khusus program jambanisasi mulai ditangani secara serius dan terprogram dengan melibatkan BAZNAS Kabupaten Karanganyar, pada bulan Juni 2013 diawali dengan berbagai rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan BAZNAS dan para *stakeholder*, kemudian dirumuskan percepatan program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar semua bersepakat bersama-sama untuk menetapkan target mendahului program *universal access* sanitasi yang ditarget secara nasional selesai tahun 2019, namun Kabupaten Karanganyar menetapkan target lebih cepat yaitu selesai pada akhir tahun 2017. Maka guna mengimplementasikan target bersama tersebut hasil rapat koordinasi bersepakat untuk bekerja sama dengan membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (POKJA STBM) dengan melibatkan tim teknis dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karanganyar, BAZNAS Kabupaten Karanganyar, unsur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan para pendamping tingkat Provinsi Jawa Tengah, maupun unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dari hal tersebut peneliti menemukan adanya model “Kerja Bareng” yang dilakukan oleh

commit to user

Kabupaten Karanganyar, sehingga proses pemberdayaan masyarakat melalui program jambanisasi selesai sesuai target.

Sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007: 144-545), menjelaskan *Collaborative Governace* adalah suatu peraturan pemerintah dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberasi yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. Adapun faktor bagi pemangku kepentingan meliputi komitmen, kepercayaan, kepemimpinan, kekuasaan, dialog atau barbagi informasi, dan sumber daya.

Kerangka *collaborative* dalam *governance* memberikan suatu pemaknaan yang lebih dari sekedar *governance*. Secara prinsip, model kerja bareng dalam *collaborative* (kolaborasi) berbeda dengan *network* (jaringan) dan *partnership* (kemitraan). Ada nilai dasar tersendiri yang melekat padanya. Untuk selanjutnya menjadi bagian karakteristiknya. Sebagai strategi model mengenai paradigma program layanan sanitasi di tingkat Kabupaten Karanganyar dengan salah satu pilar STBM yaitu percepatan program jambanisasi agar tercapai target pada akhir tahun 2017 selesai akses 100 persen sanitasi di bidang jambanisasi masyarakat. Sehingga pada model kerja bareng ini tidak hanya menekankan kepada efisiensi yang terkadang melupakan peran dan inisiatif masyarakat/*mustahiq* sebagai sasaran dari pemberdayaan masyarakat. Model kerja bareng merujuk kepada kerja bersama secara kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Karanganyar, BAZNAS Kabupaten Karanganyar, BUMD dan para stkeholder dengan warganya bergerak bersama-sama secara serempak sehingga memungkinkan berbagai kebijakan dan program dapat dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi.

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan model “Kerja Bareng” adalah sebuah sistem gerakan pemberdayaan masyarakat secara kolaborasi dalam penyelesaian suatu program, dengan strategi menyemarakkan, menyinkronkan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kurun waktu tertentu, dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah setempat, dan lembaga non-pemerintah setempat guna mengerjakan dan menyelesaikan percepatan program

jambanisasi. Melalui model “Kerja bareng” ini maka diharapkan kinerja BAZNAS mampu membantu program jambanisasi dan mampu mengatasi permasalahan terkait penyelesaian program jambanisasi. Model kerja bareng ini, dengan sistem kolaborasi melibatkan berbagai unsur seperti Pemerintah Kabupaten Karanganyar, BAZNAS Kabupten Karanganyar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unsur POKJA STBM, Unsur TNI, POLRI, atau *Stakeholder* dan para pendamping Program STBM. kesemuanya bergerak bersama-sama secara serempak dalam sistem koordinasi yang baik dalam program jambanisasi masyarakat melalui tahapan sosialisasi, pemicuan dan bantuan pembuatan jamban keluarga maupun jamban komunal sehingga tumbuh kesadaran dan terjadi perubahan perilaku BABS dengan target akhir tahun 2017 masyarakat/*mustahiq* Kabupaten Karanganyar sudah 100 persen bebas berperilaku BABS.

2) Komitmen Pimpinan

Komitmen adalah keinginan anggota organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut dan bersedia bekerja keras demi pencapaian tujuan dari organisasi/pekerjaan. (Kanter 1986) dalam (Sopiah 2008:158). Selanjutnya Glickman juga mengemukakan bahwa seseorang dianggap berkomitmen apabila ia bersedia mengorbankan tenaga dan waktunya secara relatif lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan baginya, terutama dalam usaha- usaha peningkatan pekerjaannya (Sri Banum Muslim, 2013:156).

Komitmen dalam penelitian ini dikonstruksikan berdasarkan deskripsi komitmen pimpinan dalam organisasi. Hal ini dikarenakan bahwa lokasi penelitian yaitu tempat menjalankan program jambanisasi secara administrasi merupakan suatu kerja lintas organisasi. Maka Komitmen pimpinan dalam suatu organisasi merupakan identifikasi dan representatif dari keterlibatan yang relatif kuat terhadap organisasi. Membina kerjasama pada prinsipnya adalah meningkatkan keterpaduan potensi organisasi melalui penyamaan tujuan dan membina saling percaya diantara anggota organisasi dan ini merupakan sebagian dari komitmen pimpinan di semua lini (Kouzez dan Posner 1987). Terkait komitmen pimpinan maka Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan bahwa; “Level pimpinan memegang peran penting saat melakukan perubahan, dimana

komitmen pimpinan sangat dibutuhkan bukan hanya di atas kertas. Kuncinya ketika kita mencanangkan nilai, harus bisa pastikan kita menghilangkan silo-silo yang terjadi. Ini adalah realitas yang harus kita hadapi,” pidato Menteri Keuangan pada kegiatan pencaanangan *values* di Kementerian Perindustrian, 25 Mei 2016.

Lebih lanjut Aranya dan Ferris, (1984: 1) menyatakan kepemimpinan yang ditunjukkan dalam sebuah komitmen pimpinan puncak dan didukung oleh semua anggota organisasi. Hubungan ini dilakukan secara berkelanjutan guna memberikan dukungan terhadap penyelesaian target dan terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Mengacu pada penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan atau hal tertentu. Selain itu, juga dapat memahami tujuan dari komitmen adalah kesungguhan untuk memberikan jaminan sehingga sesuatu yang telah direncanakan atau dijanjikan tidak berubah di masa depan dan tetap sesuai dengan isi komitmen.

Berdasarkan hal tersebut maka komitmen pimpinan dalam pemberdayaan melalui program jambanisasi bisa diartikan sebagai suatu prinsip atau strategi agar kemauan seseorang pemimpin dalam hal ini Bupati Karanganyar, dan para pimpinan lembaga terkait lainnya untuk secara sungguh-sungguh berbuat dan bekerja lebih baik, sesuai rencana yang telah ditetapkan atau dijanjikan sesuai isi dari komitmen, sehingga pemberdayaan masyarakat melalui program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar selesai sesuai target yang ditetapkan. Pada hakekatnya proses pemberdayaan dalam kegiatan layanan jambanisasi yang ada di semua wilayah Kabupaten Karanganyar secara sistematis menjadi tanggung jawab pimpinan disemua tingkatan dan anggota Tim Pokja STBM. Adanya komitmen pimpinan Bupati sebagai implementator dikung oleh semua pimpnan lembaga terkait, akan melahirkan pengungkit semangat dan menimbulkan kesetiaan bagi para anggota Pokja dan pendamping, termasuk para masyarakat/*mustahiq*. Hal ini mampu meningkatkan kinerja BAZKAR dan mencapai keberhasilan tujuan yaitu tercapainya target program jambanisasi tersebut.

Komitmen pimpinan sekaligus merupakan janji yang tinggi dari diri pimpinan, seseorang pimpinan akan *commit to user* mengabdikan diri dalam menuntaskan

program jambanisasi lebih cepat dari target nasional tahun 2019 yaitu ditarget selesai 100 persen akses sanitasi menyeluruh di Kabupaten Karanganyar khusus jambanisasi pada tahun 2017. Ketika seorang pimpinan memiliki komitmen maka semua anggota organisasi dalam hal ini Tim Pokja dan semua stakeholder dapat merasa aman, nyaman dan optimis dalam mengemban tugas dan fungsinya. Pelaksanaan pemberdayaan melalui program jambanisasi menerapkan prinsip-prinsip, strategi dan tahap-tahap pemberdayaan komitmen pimpinan menjadi faktor penting yang diharapkan berperan dalam mewujudkan keberhasilan model pemberdayaan melalui program jambanisasi.

Pemimpin tidak boleh hanya mempunyai kemampuan dalam menentukan dan merumuskan visi dan misi saja, namun juga harus mempunyai kemampuan manajerial. Yang dimaksud dengan kemampuan manajerial adalah kemampuan pemimpin untuk menjalankan seluruh aktivitas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen adalah suatu proses pengaturan untuk mencapai tujuan dengan melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Maka dari itu, pemimpin dalam hal ini Bupati Karanganyar dan para pimpinan lembaga terkait lainnya harus menjalankan fungsi manajemen secara benar. Menurut George R. Terry (2006), fungsi manajemen disingkat menjadi POAC yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*.

Keempat fungsi manajemen ini tidak berjalan secara linear, namun spiral sehingga memungkinkan suatu organisasi akan bergerak terus menerus dan tidak berhenti pada satu tahap. Siklus manajemen yang dilakukan oleh perusahaan adalah merencanakan, mengorganisasi staf dan sumber daya yang ada, melaksanakan program kerja, dan mengendalikan jalannya pekerjaan. Dalam tahap pengendalian tersebut, manajemen akan melakukan evaluasi untuk memperoleh *feed back* yang digunakan sebagai dasar perencanaan selanjutnya, atau dapat juga digunakan untuk perencanaan kembali. Penjelasan terkait fungsi manajemen dapat dilihat sebagai berikut:

- a) *Planning* (perencanaan) merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan tahap awal dari proses manajemen karena pada tahap ini disusun berbagai aktivitas organisasi

ke depannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam melakukan perencanaan ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan dan membuat *budget* (anggaran). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat perencanaan, yaitu SMART. SMART yaitu *Specific* yang berarti harus jelas apa saja kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan. Kedua, *Measurable* yaitu aktivitas tersebut dapat diukur tingkat keberhasilannya. Selanjutnya, *Achievable* yaitu perencanaan dapat dicapai, bukan hanya suatu rencana yang tidak dapat dilakukan. Keempat, *Realistic* yaitu rencana tersebut dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Terakhir, *Time* yaitu rencana yang telah ditetapkan terdapat batasan waktu yang jelas sehingga perencanaan tersebut dapat dinilai dan dievaluasi.

- b) *Organizing* (pengorganisasian) adalah suatu kegiatan pembagian tugas kepada setiap sumber daya yang ada sesuai dengan kemampuan masing-masing sumber daya tersebut. Terdapat dua kegiatan yang dilakukan pada tahap *organizing*, yaitu *staffing* dan pepaduan segala sumber daya. *Staffing* adalah kegiatan yang sangat penting karena pada kegiatan ini, manajemen menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat sehingga dapat menjamin kegiatan yang dilakukan. Setelah menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat, pemimpin perlu mengkoordinasikan seluruh potensi sumber daya tersebut agar semuanya berjalan sinergi.
- c) *Actuating* adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan. Tahapan ini terdiri dari kepemimpinan dan koordinasi, yaitu pemimpin mampu memimpin setiap sumber daya yang ada untuk bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya dan mengkoordinasi agar kerja sama ini dapat dilakukan dengan harmonis. Hal ini dapat menghindari persaingan yang ada antar sumber daya yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan.
- d) *Controlling* bukan hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan, namun juga melakukan koreksi-koreksi apabila aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat

sebelumnya. Dengan kata lain, tujuan utama dari *controlling* adalah untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan.

Jadi pemimpin dalam hal ini Bupati Karangnyar dan para pimpinan lembaga terkait lainnya, bukan hanya bertugas dalam merancang visi dan misi saja, namun juga harus menjalankan fungsi manajemen. Apabila fungsi manajemen tersebut dapat dijalankan dengan benar, maka tujuan organisasi dapat dengan tepat dicapai sesuai target.

12. Kajian Potensi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)

Secara etimologis zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (Hafidhuddin, 1998: 13). Diberikan pengertian zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran, kikir, dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran dari nilai harta pribadi yang memerlukan (Inoed, 2005: 8). Berdasarkan aturan formal bahwa peraturan zakat di Indonesia telah mempunyai payung hukum yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Untuk mendukung keberlangsungan aturan ini, pemerintah telah mengakomodir semuanya yaitu melalui BAZNAS, BAZDA adapun dari pihak swasta bisa melalui dompet dhuafa, rumah zakat, lazis yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Karena melihat mayoritas Indonesia berpenduduk agama Islam, hal ini sangatlah potensi untuk dikembangkan (Abdoeh, 2019: 144).

Tugas BAZKAR dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS selalu konsisten melalui program kerja dan sesuai dengan tuntunan/syariah islam yaitu menyalurkan kepada para *mustahiq* dengan sasaran 8 *asnaf* salah satunya adalah untuk membantu mempercepat program jambanisasi masyarakat melalui pemberdayaan. Potensi zakat yang dihimpun dari para *muzzaki* yang dalam pengumpulannya setiap tahun selalu meningkat bahkan BAZNAS Kabupaten Karanganyar menduduki urutan pertama dalam pengumpulan zakat setiap tahunnya untuk Provinsi Jawa Tengah, maka pada penelitian ini akan dikaji secara mendalam tentang kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat dan pemberdayaan masyarakat melalui program jambanisasi dengan model yang diterapkan di Kabupaten Karanganyar.

Jumlah harta yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut disebut zakat karena dikeluarkan diyakini akan bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Qardhawi, 1993: 19). Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan (Lahmudin, 1995: 145).

Tabel 2.1 Jenis dan Perhitungan Zakat

No	Jenis Harta	Nishob	Jumlah Zakat	Keterangan
1.	Emas	85 gr	2,5 persen	setelah umur 1 th
	Perak	595 gr	2,5 persen	setelah umur 1th
2.	Harta Perniagaan	85 gr emas	2,5 persen	Setelah 1 tahun nishobnya : Jumlah barang yang ada + laba 1 tahun
3.	Binatang Ternak	5-9 ekor	1 kambing	Umur 1 tahun
	Unta	10-14 ekor	2 kambing	Umur 2 tahun
	Sapi	15-19 ekor	3 kambing	Umur 1 tahun
	Kambing	30-39 ekor	1 sapi	Umur 1 dan 2 tahun
		40-59 ekor	1 sapi	
		60-69 ekor	2 sapi	
		70-79 ekor	2 sapi	
		40-120 ekor	1 kambing	
		121-200 ekor	2 kambing	
		201-399 ekor	3 kambing	
		400-499 ekor	4 kambing	
4.	Hasil Tanaman	5 Watsaq senilai 653 kg beras	sen jika dengan Irigasi persen jika tanpa irigasi	Setiap panen
5.	Tambang Harta Karun	85 gr emas tanpa nishob	2,5 persen 20 persen	Setiap mendapatkan
6.	Profesi			
	Qiyas ke Emas	85 gr	2,5 persen	Setiap mendapatkan
	Qiyas ke Tanaman dan Emas	653 kg beras	2,5 persen	
	Qiyas ke Tanaman	653 kg beras	5 persen	
7.	Saham	85 gr emas	2,5 persen emas	Harga saham
8.	Benda-benda Produktif	653 kg	5 persen atau 10 persen	Dari penghasilan

Sumber: Hadist Rasulullah S.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas Bin Malik Ra. (diolah).

13. Kajian Program STBM dan Keterkaitan Tujuan 6 dari SDGs tentang Air dan sanitasi

a. Kondisi umum

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan yang digunakan untuk merubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF). Sedangkan Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang *higienis* dan *saniter* secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Permenkes RI No.03 tahun 2014).

Selanjutnya dalam Kemenkes RI nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) disebutkan tentang peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan seperti, di tingkat RT/Dusun/Kampung/lingkungan memiliki peran dan tanggung jawab mempersiapkan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif, di tingkat desa berperan dan bertanggung jawab dalam membentuk tim fasilitator desa atau kader pemicu STBM untuk memfasilitasi gerakan masyarakat dan pada tingkat kecamatan pemerintah kecamatan berperan dan bertanggung jawab berkoordinasi dengan Dinas/Badan instansi Pemerintah yang lain dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM. Kabupaten berperan dan bertanggung jawab mempersiapkan rencana Kabupaten untuk mempromosikan strategi yang baru, mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi program STBM, mengembangkan rantai suplai sanitasi, dan memberikan dukungan *capacity building* yang diperlukan kepada semua institusi.

Kondisi umum pembangunan sanitasi di Indonesia dihadapkan pada masalah sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar sembarangan (BABS). Maka tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah, bagaimana pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai program nasional, STBM akan terus berlangsung dan telah dilakukan implementasi di 244 kabupaten/kota serta 2.583 kecamatan, sehingga pada triwulan I tahun 2013

terdapat sejumlah 11.678 desa/kelurahan yang melaksanakan STBM. Kegiatan STBM ini diharapkan mempunyai andil yang signifikan terhadap pencapaian target Air Minum dan Sanitasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Renstra Kemenkes (Cita Sari et al., 2018).

Fakta membuktikan bahwa keterbatasan akses masyarakat pada air bersih ternyata tak melulu terjadi karena adanya bencana alam. Pada beberapa daerah yang sulit air juga membuat masyarakatnya tidak bisa memperoleh air bersih, bahkan untuk mandi sekalipun. Oleh karena itu, inti persoalan yang diangkat pada *Sustainable Development Goals (SDGs)* air bersih adalah akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air. Satu hal yang perlu diingat, begitu peran penting air dalam kehidupan sehari-hari tak sebatas untuk pemenuhan kebutuhan dasar saja, seperti minum dan mandi. Termasuk didalamnya kebutuhan irigasi area pertanian, mengingat hal tersebut juga mendukung ketahanan air dan pangan. Sekalipun data menunjukkan adanya peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih pada akhir tahun 2015, jumlahnya belumlah relevan. Maka, dalam *SDGs* tujuan keenam, ditetapkan delapan target, yang terdiri dari enam target utama dan dua *target means of implementation* (cara pelaksanaan). Kedelapan target tersebut diuraikan lebih detail menjadi 29 indikator nasional. Lebih lanjut, pemerintah telah mengembangkan indikator yang merupakan turunan dari kebijakan RPJMN 2015–2019.

Dengan kata lain, *SDGs* tujuan keenam merupakan salah satu tujuan yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia pada lima tahun pertama pelaksanaan *SDGs*. Ditargetkan pada tahun 2019, Indonesia sudah mencapai 100 persen akses air bersih dan sanitasi layak. Target tersebut mencakup dua aspek. Pertama, target 85 persen pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang terdiri dari sistem air limbah setempat yang memadai (85 persen), sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota (15 persen), fasilitas pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah atau *reduce, reuse, recycle* di perkotaan (20 persen), serta sistem penanganan sampah di perkotaan (80 persen); kedua, target 15 persen pemenuhan kebutuhan dasar. Melalui aspek ini diharapkan menyasar kawasan dengan

kepadatan rendah dan daerah yang memiliki level kerawanan sanitasi rendah. Oleh karena itu, pencapaian kebutuhan dasar ini dititik beratkan pada layanan dan praktik dasar yang layak untuk kedua tipe kawasan tersebut.

Meskipun hak atas air dan sanitasi tidak secara spesifik dinyatakan dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, disingkat ICESCR, atau "Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. Negara yang telah meratifikasi perjanjian ini berkomitmen untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya individu dan wilayah perwalian dan wilayah yang tidak memerintah sendiri. Beberapa contoh hak yang dijamin adalah hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak atas standar kehidupan yang layak.

Pada tahun 2015, terdapat 164 negara yang telah menjadi negara anggota perjanjian ini. Enam negara lain (termasuk Amerika Serikat) telah menandatangani perjanjian ini, tetapi belum meratifikasinya. Perjanjian ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan deklarasi Hak Asasi Manusia Universal dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pelaksanaan perjanjian ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Air dan sanitasi merupakan bagian fundamental bagi setiap manusia untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatannya, dan karenanya juga harus dipandang sebagai elemen utama dalam pemenuhan hak kepada standar hidup yang layak (Pasal 11 ICESCR) serta hak atas kesehatan (Pasal 12 ICESCR). Berdasarkan hal ini, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) akhirnya mengadopsi Ketentuan Umum No. 15 tentang hak atas air, yang mencakup hak atas sanitasi yang layak. (*Fact Sheet No.2 .Rev.1, The International Bill of Human Rights*". UN OHCHR. June 1996). Di tingkat nasional, hak atas kesehatan dan standar hidup yang layak juga dinyatakan didalam UUD 1945. Hak-hak ini juga ditegaskan kembali didalam UU No.11/2005 tentang Ratifikasi ICESCR.

commit to user

Lebih lanjut, Indonesia juga telah mengesahkan undang-undang terkait pengelolaan sumber daya air, yaitu UU No.7/2004, namun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015. Air minum masih tidak dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. UNPDF mengindikasikan bahwa setidaknya terdapat 42,8 persen masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses kepada sumber air yang layak, sementara sekitar 55 juta orang (22 persen populasi) masih melakukan buang air sembarangan. (UNPDF 2016-2020, *page*: 22) sehingga eksploitasi air berlebihan dan pengelolaan yang buruk adalah faktor-faktor ancaman utama bagi kualitas, keamanan, maupun aksesibilitas air (World Bank, Water Sanitation, 2015).

b. Kaitan *SDGs*, Nawacita dan Akses Sanitasi

Pemerintah Indonesia telah memiliki prioritas pembangunan, sesuai dengan program dan prioritas dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019. Terdapat konvergensi dan divergensi antara *SDGs* dan Nawacita. Dalam hal pembangunan manusia dan upaya penurunan ketimpangan, kedua dokumen selaras berjalan. Dalam hal pembangunan ekonomi, keduanya juga teman seiring. Namun, dalam hal keberlanjutan, ekologi dan konservasi lingkungan hidup, maka Nawacita dan RPJMN harus melakukan banyak penyesuaian (konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, penurunan kerusakan hutan, manajemen air, laut, dan sebagainya).

Meski begitu, secara keseluruhan banyak pihak sepakat bahwa terdapat beberapa fokus *SDGs* yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita) terdapat lima prioritas di antaranya: 1) keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis; 2) peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agrarian; 3) pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola

produksi dan konsumsi berkelanjutan; 4) akses energi yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan; 5) perubahan iklim, di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca melalui Perpres No. 61/ 2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi. Pelaksanaan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai bidang terkait dituangkan didalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah. Keselarasan *SDGs* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla “Nawacita” diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian RPJMN 2014–2019 sekaligus melengkapi prioritas strategi pembangunan terutama terkait dengan tujuan–tujuan yang berkaitan dengan lingkungan, energi bersih serta upaya menangani perubahan iklim.

c. Target Nasional terkait Tujuan 6 dari *SDGs* tentang Air dan Sanitasi

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target-target berikut di bawah Tujuan 6 dari *SDGs*, yaitu menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi bagi semua, sejalan dengan RPJMN:

Tabel 2.2 Target Global, Target Nasional dan Indikator Nasional Terkait Air Dan Sanitasi

Target Global	Target Nasional	Indikator Nasional
6.1.Pada 2030, mencapai akses universal dan merata kepada air minum aman dan terjangkau bagi semua.	1.Peningkatan akses kepada layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Perwujudan 100 persen layanan air minum, dengan 85 persen populasi terlayani akses kepada air sejalan dengan prinsip 4K dan 15 persen lainnya akan terlayani sesuai dengan layanan kebutuhan dasar

<p>6.2. Pada 2030, mencapai akses sanitasi dan kebersihan layak dan merata bagi semua serta mengakhiri BAB sembarangan, dengan perhatian khusus kepada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok yang berada dalam situasi rentan.</p>	<p>1. Peningkatan akses kepada layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. 2. Peningkatan implementasi promosi kesehatan dan pemberdayaan bagi masyarakat.</p>	<p>a. Tercapainya 100 persen layanan sanitasi (air limbah domestik, sampah domestik, drainase lingkungan), yang berarti 85 persen populasi akan terlayani sesuai dengan standar layanan, dan 15 persen populasi akan terlayani sesuai dengan kebutuhan dasar (Baseline 2014: 60,9 persen, target 2019: 100 persen). b. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi PHBS (Baseline 2014: 40 persen, target 2019: 80 persen).</p>
<p>6.3. Pada 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya, memotong separuh proporsi air limbah tak terolah dan meningkatkan secara signifikan daur ulang dan penggunaan kembali (<i>reuse</i>) yang aman ditingkat global.</p>	<p>1. Sistem infrastruktur air limbah kota terpusat di 438 kota/kabupaten; 2. Pemenuhan air baku untuk rumah tangga, wilayah perkotaan dan industri.</p>	<p>a. Jumlah kabupaten/kota yang terlayani dengan sistem infrastruktur air limbah kota terpusat (Baseline 2014: 60 persen, target 2019: 95 persen); b. Peningkatan kapasitas infrastruktur air baku untuk rumah tangga, wilayah perkotaan dan industri (baseline 2014: 51,44m³/detik; target 2019: 118,5m³/detik).</p>
<p>6.4. Pada 2030, meningkatkan secara signifikan efisiensi penggunaan air di seluruh sektor dan menjamin penarikan (<i>withdrawal</i>) dan pasokan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan mengurangi secara signifikan jumlah warga yang menderita kelangkaan air.</p>	<p>1. Peningkatan kondisi dan fungsi reservasi air dan sumber air lainnya; 2. Perbaikan kondisi dan fungsi reservasi air dan sumber air lainnya.</p>	<p>a. Jumlah kolam retensi (retention basin) dan reservoir air lain yang dibangun. (Baseline 2014: 299; target 2019: 216); b. Jumlah dam yang ditingkatkan/direhabilitasi (baseline 2014: 7, target 2019: 11). c. Jumlah kolam retensi dan reservoir air lain yang ditingkatkan/direhabilitasi. (Baseline 2014: 55, target 2019: 143); d. Peningkatan kapasitas infrastruktur air baku untuk melayani rumah tangga, wilayah perkotaan dan industri. (Baseline 2014: 60 persen, target 2019: 95 persen); e. Jumlah dam yang dibangun.</p>
<p>6.5 Pada 2030, melaksanakan pengelolaan sumber air terintegrasi di seluruh tingkatan, termasuk melalui kerja sama lintas-negara jika</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA); <i>user</i></p>	<p>a. Kapasitas PLTA; b. Tersedianya 1 juta hektar sawah teririgasi dan diperbaikinya 3 juta hektar jaringan irigasi. (Baseline 2014: 50,7 GW, target 2019: 86,6</p>

<p>diperlukan.</p>	<p>2.Tersedianya fasilitas dan infrastruktur irigasi; Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi untuk mengurangi lahan tidak produktif untuk mendukung daerah aliran sungai/DAS (<i>watershed</i>) dan perlindungan air untuk Bantaran Sungai Prioritas (<i>Priority Watershed</i>). Tersedianya fasilitas dan infrastruktur untuk irigasi.</p>	<p>GW); c.Jumlah bantaran sungai prioritas dengan peningkatan mata air melalui konservasi sumber air vegetatif, kolam retensi, dam pengontrol dan penahan dan check dam (<i>gully plugs</i>) di bantaran sungai hulu dan sumur resapan (target 2019: 15 DAS, tidak ada baseline); d.19 DAM lintas provinsi harus memiliki MoU/status; e.Peningkatan kepastian sumber air untuk irigasi dari <i>reservoir</i> melalui penyelesaian 16 pembangunan <i>reservoir</i> dan pembangunan 49 <i>reservoir</i> baru; f.Jumlah kolam retensi dan <i>reservoir</i> air yang selesai dibangun. (Target 2019: 216, tidak ada baseline). g.Jangkauan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan. Target 2019: tidak ada <i>baseline</i>). h. Jangkauan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan. (Target 2019: 3.482,00, tidak ada baseline).</p>
<p>6.6 Pada 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait air, termasuk gunung, hutan, lahan basah, sungai, <i>akuifer</i>, dan danau.</p>	<p>1.Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi untuk mengurangi lahan tak produktif untuk mendukung DAS dan perlindungan air untuk DAS Prioritas.</p>	<p>a.Jumlah DAS prioritas yang terestorasi melalui pembangunan kolam retensi, dam pengontrol dan penahan/retensi, serta dam skala kecil dan medium di wilayah hulu (target 2019: 15 DAS, tidak ada baseline); b.Penurunan jumlah lahan tidak produktif hingga 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi oleh Unit Pengelolaan Hutan dan DAS; c.Jumlah DAS prioritas dengan mata air yang ditingkatkan melalui konservasi sumber daya air vegetatif, kolam retensi, dam pengendali dan penahan serta check dam di DAS hulu dan sumur resapan. (Target 2019: 15 watershed, tidak ada baseline); d.Jumlah danau prioritas dengan kualitas air dan status tropis yang meningkat hingga <i>mesotrofik</i>, sejumlah 15 danau prioritas;</p>

		e.Persentase persiapan dam, kolam retensi, dan reservoir air lainnya yang ditingkatkan/direhabilitasi, hingga 100 persen dari jumlah total peningkatan/rehabilitasi per tahun;
		f.Jumlah danau prioritas, dengan rata-rata
6.a Pada 2030, memperluas kerja sama internasional dan dukungan pembangunan kapasitas bagi negara berkembang dalam kegiatan dan program terkait air dan sanitasi, termasuk air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, serta teknologi daur ulang dan reuse.	1.Peningkatan anggaran untuk pengembangan air dan sanitasi yang dialokasikan dalam APBN.	Tidak tersedia.
6.bMendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.

Sumber: World Bank, Water Sanitation, Desember 2015

Secara nasional, sejak awal pelaksanaan RPJMN, pemerintah telah mengajak peran serta aktif unsur non-pemerintah dalam pengadaan air bersih ini. Ketiga unsur non-pemerintah yang dimaksud adalah *filantropi* dan pelaku usaha, akademisi dan tenaga ahli, serta organisasi masyarakat sipil dan media. Penyediaan air bersih di berbagai daerah yang mengalami krisis air bersih dapat diupayakan lewat kerja sama dengan perusahaan dan LSM dengan pemerintah setempat. Akan tetapi, upaya dari sisi pembuat kebijakan tidaklah cukup jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat.

Kondisi masyarakat Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, hasil penelitian awal menunjukkan bahwa, tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013 sebesar 13,58 persen atau sejumlah atau 114.231 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2013 sejumlah 840.171 jiwa, dengan masih tingginya tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Karanganyar jelas kebutuhan sanitasi dan air minum yang bersih dan sehat secara mandiri sangat berat, ditambah kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup

sehat mengalami hambatan, data tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan menunjukkan bahwa masih banyak perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Sedangkan dari sisi penyediaan sarana sanitasi menunjukkan data bahwa: Kepala Keluarga (KK) masih berperilaku BABS sebanyak 30.458 KK atau 12,40 persen dari jumlah KK se Kabupaten Karanganyar yang jumlahnya 245.628 KK, yang sudah akses jamban sehat 87,60 persen; atau sejumlah 215.170 KK memiliki jamban sehat permanen 71,20 persen; atau sebanyak 174.887 KK memiliki jamban (Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar November 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan masalah sanitasi merupakan kewenangan daerah, tetapi sampai saat ini belum memperlihatkan perkembangan yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu memperlihatkan dukungannya melalui kebijakan dan penganggarannya serta upaya-upaya lain seperti kerjasama dengan lembaga pengelola zakat maupun pemanfaatan dana CSR Perusahaan dalam rangka percepatan program STBM khususnya program jambanisasi masyarakat.

d. Strategi STBM

Sejak lahirnya Keputusan Menteri Kesehatan No 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis masyarakat. STBM memiliki 6 (enam) strategi nasional, yaitu: Penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*); Peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand creation*); Peningkatan penyediaan sanitasi (*supply improvement*); Pengelolaan pengetahuan (*knowledge manajemen*); Pembiayaan; Pemantauan dan evaluasi.

Melalui strategi tersebut, luncuran program STBM memiliki beberapa keunggulan program dibandingkan dengan program lainnya yaitu: Satu-satunya program yang mengusung non subsidi untuk pembangunan sarana jamban tingkat rumah tangga; Sampai saat ini masih menjadi program sanitasi yang terbukti paling cepat meningkatkan akses sanitasi dan perubahan perilaku hygiene di Indonesia; STBM adalah satu-satunya program sanitasi yang menyasar langsung

commit to user

ke tingkat rumah tangga; STBM berfokus pada perubahan perilaku, bukan pembangunan sarana.

e. Lima Pilar STBM

Guna mempercepat program STBM di Indonesia dan diseluruh daerah telah diberikan pedoman pelaksanaan teknis STBM oleh kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012 dan dicanangkan lima pilar STBM yaitu;

1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)

Suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit dengan dapat mengakses jamban.

2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. CTPS merupakan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.

3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan di Rumah Tangga (PAMM-RT)

Masyarakat melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga. PAMM-RT merupakan suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga.

4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga

Tujuan pengelolaan sampah rumah tangga adalah untuk menghindari penyimpanan sampah dalam rumah dengan segera menangani sampah. Penanganan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Masyarakat melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan.

f. Tingkatan Partisipasi dalam STBM

Program STBM tingkatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat terwujud melalui proses dan cara-cara sebagai berikut: 1) masyarakat sasaran dalam STBM tidak dipaksa untuk menerapkan kegiatan program tersebut, akan tetapi program ini berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatannya. tingkat partisipasi masyarakat sangat berbeda, dimulai dari tingkat partisipasi yang terendah sampai tertinggi; 2) masyarakat hanya menerima informasi; keterlibatan masyarakat hanya sampai diberi informasi (misalnya melalui pengumuman) dan bagaimana informasi itu diberikan ditentukan oleh si pemberi informasi; 3) masyarakat mulai diajak untuk berunding. pada level ini sudah ada komunikasi 2 arah, disini masyarakat mulai diajak untuk diskusi atau berunding. Dalam tahap ini meskipun sudah dilibatkan dalam suatu perundingan, pembuat keputusan adalah orang luar; 4) membuat keputusan secara bersama-sama antara masyarakat dan pihak luar, pada tahap ini masyarakat telah dilibatkan untuk membuat keputusan secara bersama-sama untuk kegiatan yang dilaksanakan; 5) masyarakat mulai mendapatkan wewenang atas kontrol sumber daya dan keputusan, pada tahap ini masyarakat tidak hanya membuat keputusan, akan tetapi telah ikut dalam kegiatan kontrol dalam pelaksanaan program.

g. Prinsip-Prinsip STBM

Dalam pelaksanaannya program STBM ini mempunyai beberapa prinsip utama, yaitu: Tidak adanya subsidi yang diberikan kepada masyarakat, demikian juga dan tidak terkecuali untuk kelompok miskin untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar; Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat sasaran; Menciptakan perilaku masyarakat yang *higienis* dan *saniter* guna mendukung terciptanya sanitasi total; Masyarakat sebagai pemimpin dan seluruh masyarakat terlibat langsung dalam analisa permasalahan, perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan dan pemeliharaan; 5) Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi (Permenkes RI No.03 tahun 2014).

h. Indikator Output STBM

Dalam mempercepat program dan sebagai evaluasi program secara menyeluruh dan berkelanjutan ditetapkan beberapa indikator *output* STBM yang meliputi: Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air sembarangan (*Open Defecation Free*); Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga; Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar; Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar; Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar (Permenkes RI No.03 tahun 2014).

B. Kerangka Berpikir

Bertitik tolak dari pengkajian berbagai teori yang relevan, yang dilandasi oleh sajian berbagai temuan model pemberdayaan masyarakat dan model pengelolaan zakat *infaq* dan *shodaqoh* (ZIS) yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Maka sebagai landasan proses berpikir peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan tentang Kinerja BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat melalui program jambanisasi di Karanganyar. Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa secara umum masih banyak masyarakat Kabupaten Karanganyar yang berperilaku BABS, dan kondisi sanitasi yang belum *higienis* sedangkan secara khusus di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013 masih terdapat penduduk miskin sebesar 13,58 persen atau sejumlah atau 114.231 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2013 sejumlah 840.171 jiwa, sedang dari sisi penyediaan sarana sanitasi menunjukkan data bahwa: Kepala Keluarga (KK) masih berperilaku BABS sebanyak 30.458 KK atau 12,40 persen dari jumlah KK se Kabupaten Karanganyar yang jumlahnya 245.628 KK, sedangkan para keluarga yang sudah akses jamban sehat 87,60 persen; atau sejumlah 215.170 KK, warga memiliki jamban sehat permanen sebesar 71,20 persen; atau sebanyak 174.887 KK (Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar November 2013).

Melihat kondisi ekonomi keluarga miskin atau keluarga dengan penghasilan rendah, jelas sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari apalagi untuk membuat jamban sehat secara mandiri, dan akan berakibat masih banyaknya warga yang melakukan BABS dan masih rendahnya derajat kesehatan yang dipicu pula oleh masih rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat yang berpengaruh pada sikap dan perilaku hidup sehat, dengan keadaan ini akan berpengaruh terhadap keberdayaan keluarga dalam menanggulangi masalah kesehatan lingkungan, kendatipun Pemerintah sudah melakukan kegiatan dan bantuan jamban keluarga, namun baru bersifat *simultant* dan *sporadis* belum terprogram dengan baik dan belum melibatkan lembaga lain untuk ikut berperan secara nyata, faktor keterbatasan dana pemerintah dan keterbatasan akses pelayanan yang diakibatkan adanya kesenjangan antara pemerintah dalam penyaluran dana APBD dengan keterbatasan masyarakat yang kurang mampu untuk dapat mengakses kelengkapan persyaratan untuk memperoleh bantuan dana APBD, mendorong program jambanisasi masyarakat ini perlu disusun dan dicanangkan dengan melibatkan lembaga lain yang berpotensi dalam menjembatani akses bantuan dana yang tidak terjangkau oleh pelayanan APBD. Dengan melihat keberadaan lembaga daerah dan perusahaan daerah yang mengelola dana seperti potensi zakat dengan peran BAZNAS dan potensi CSR dengan peran BANK JATENG menjadi modal penguat dan perlu dilibatkan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar.

Upaya mempercepat akses sanitasi menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar merupakan terobosan kebijakan dan memang sangat perlu dilakukan mengingat masih banyaknya penduduk yang belum mampu membuat jamban keluarga secara mandiri dan masih banyaknya perilaku masyarakat yang BABS. keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pelayanan jambanisasi, menjadi permasalahan juga dalam mempercepat program jambanisasi masyarakat, namun demikian melalui kineja BAZNAS dan Komitmen bersama dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam percepatan *commit to user* program Jambanisasi sebagai salah satu pilar

STBM dan sejalan dengan program pemerintah pusat dalam penyediaan air minum untuk semua sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, sebagai upaya untuk mencapai akses universal pada akhir tahun 2019 dan sekaligus merupakan realisasi dari program global yang ingin mewujudkan tujuan 6 *SDGS*, yaitu menetapkan kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi.

Maka dalam membangun dan mewujudkan tujuan 6 *SDGs* ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar sejak awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Karanganyar (2013-2018), telah mencanangkan program jambanisasi masyarakat dengan mengajak peran serta aktif dari unsur non-pemerintah, diantaranya dengan memanfaatkan potensi zakat yang dihimpun dari para penyeton zakat *infaq* dan *shodakoh* (ZIS) atau sering disebut sebagai para *muzzaki* yang dikelola oleh BAZNAS. Potensi lain adalah CSR perusahaan yang bersedia bekerja sama dalam penyelesaian program jamban sehat seperti BANK JATENG Cabang Karanganyar yang bersedia membantu untuk masyarakat yang tidak mampu sebagai upaya mendukung program jambanisasi masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh informasi secara deskriptif tentang kondisi kesehatan rumah tangga dengan fokus tersedianya jamban di masing-masing keluarga yang memenuhi syarat dan standar kesehatan atau jamban sehat dan untuk mengkaji perubahan perilaku masyarakat dalam buang air besar, serta untuk mengetahui penerapan model pemberdayaan masyarakat dalam program jambanisasi. Sampel diambil secara acak dengan kriteria keluarga yang menjadi sasaran rumah tangga/keluarga penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar (BAZKAR). Para *muzzaki*, para pimpinan BAZKAR, para Pokja, STBM dan para pendamping tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengamatan, melakukan wawancara dan meminta dokumen dan mencatat secara cermat di lapangan. Seperti bahan pertanyaan, bagaimana potensi ZIS di Kabupaten Karanganyar yang dihimpun dari para *Muzzaki*, dan bagaimana perilaku *mustahiq* (penerima

bantuan) apakah mampu swadaya, dan apakah setelah memiliki jamban sendiri sudah tidak lagi berperilaku BABS, sasaran wawancara dan pengambilan data ditujukan kepada para nara sumber yang sama seperti para Pimpinan BAZKAR, dan Staf pada Sekretariat BAZKAR. Lebih lanjut guna mendapatkan validitas data peneliti juga menggunakan triangulasi sumber, pada metode ini peneliti dalam mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, misalnya untuk memperoleh data tentang perkembangan penghimpunan dana ZIS peneliti menanyakan langsung kepada beberapa *muzzaki*, sebagian para Unit pengumpul Zakat (UPZ), sebagian Petugas Pengumpul Zakat (PPZ) dan Para Pimpinan BAZKAR.

Melihat kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Karanganyar dengan banyaknya perilaku BABS dan permasalahan keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menggarap STBM khususnya pada program jambanisasi masyarakat, sejalan dengan tujuan keenam *SDGs* yang sejalan pula dengan program Nawa cita dan melihat peluang maupun potensi zakat dari para *muzzaki* yang dikelola BAZKAR serta potensi CSR BANK JATENG dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Maka fokus peneliti akan mengkaji beberapa hal yang esensial melalui alur kerangka berpikir sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari kerangka kelembagaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar fokus kajian peneliti adalah dalam hal kebijakan pemerintah Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat diketahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar program jambanisasi masyarakat dalam memanfaatkan dana pemerintah dan upaya kerjasama memanfaatkan potensi zakat dari para *muzzaki* di bawah pengelolaan BAZKAR dan bagaimana proses kebijakan pemerintah dalam menggandeng/pelibatan CSR BANK JATENG dalam membantu percepatan program jambanisasi masyarakat.
- 2) Dilihat dari kerangka kelembagaan BAZKAR fokus peneliti pada kajian dalam kaitannya dengan kinerja BAZKAR sebagai pengelola zakat dengan konsep dan teori efektivitas sehingga dapat memperoleh gambaran dan jawaban atas peran posisi BAZKAR sebagai jalan solusi kesenjangan akses pelayanan antara

pemerintah dalam menyalurkan dana APBD dan masyarakat yang tidak terjangkau dalam penerima bantuan jambanisasi, demikian juga proses penyaluran bantuan apa sudah benar sesuai sasaran *mustahiq* dan program BAZKAR apakah sejalan dengan program Pemerintah sehingga para *muzzaki* dapat memahami dan para *mustahiq* dapat menerima *pentashorupan* atas dana zakat, dalam kinerja BAZKAR akan dikaji peran dan posisinya baik dalam hubungan dengan pemerintah, *muzzaki* dan *mustahiq* dalam kapasitasnya membantu program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar.

- 3) Dilihat dari kerangka perubahan perilaku *mustahiq* terhadap kinerja BAZKAR, maka fokus peneliti mengarah pada bagaimana proses pemberdayaan dengan landasan konsep dan teori perubahan perilaku, apakah penerima manfaat zakat yang didistribusikan oleh BAZKAR apakah telah diterima dengan baik apakah dimanfaatkan dengan baik dan apakah telah terjadi perubahan perilaku khususnya tentang perilaku BABS pasca menerima bantuan jambanisasi masyarakat.
- 4) Dilihat dari kerangka implementasi pemberdayaan dengan fokus pada suatu proses yang berkaitan langsung dengan suatu kebijakan dan program-program yang akan diterapkan melalui kinerja BAZKAR yang sejalan dengan kebijakan pemerintah terutama dalam mempercepat akses sanitasi lingkungan untuk program jambanisasi masyarakat dengan pemanfaatan dana Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui APBD, dana ZIS melalui kinerja BAKAR Dan dana CSR melalui peran BANK JATENG untuk mendukung program-program jambanisasi tersebut. Dalam penelitian ini maka pemberdayaan melalui program jambanisasi masyarakat ini dapat diukur dengan mengkaitkan indikator atau kriteria yang dijelaskan oleh AG. Subarsono (2008: 91) empat variabel sebagai indikator yang mempengaruhi hasil implementasi proses pemberdayaan dalam program jambanisasi masyarakat di Kabupaten Karanganyar, yang meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.
- 5) Dilihat dari kerangka pemberdayaan masyarakat dengan berbagai landasan teori prinsip dan proses pemberdayaan, sehingga ditemukan bentuk atau model

keberdayaan masyarakat yang tepat dalam program jambanisasi masyarakat, maka peneliti menggunakan pendekatan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Jim Ife (2002) yaitu: ada enam prinsip yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyukseskan program pemberdayaan yakni prinsip *Integrated development* (Pembangunan terpadu dan seimbang), *Sustainability* (Berkelanjutan), *Empowerment* (Pemberdayaan), *The Integrity of Process* (Keterpaduan Proses), *Participation* (Partisipasi) dan *Defining Need* (Mendefinisikan kebutuhan) (Jim Ife, 2002: 231-257).

Pandangan ini secara *substansial* sejalan dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang dikembangkan oleh Iffe dengan membagi 26 prinsip yang di klasifikasikan menjadi empat asas dan prinsip pokok yaitu ekologi, keadilan sosial, menghargai nilai-nilai lokal, proses dan prinsip global lokal (Ife, 2002: 469). Hal ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, karena pengembangan masyarakat sebagai hasil perencanaan sosial perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang selalu melibatkan *stakeholders* dalam setiap proses pengambilan keputusan.

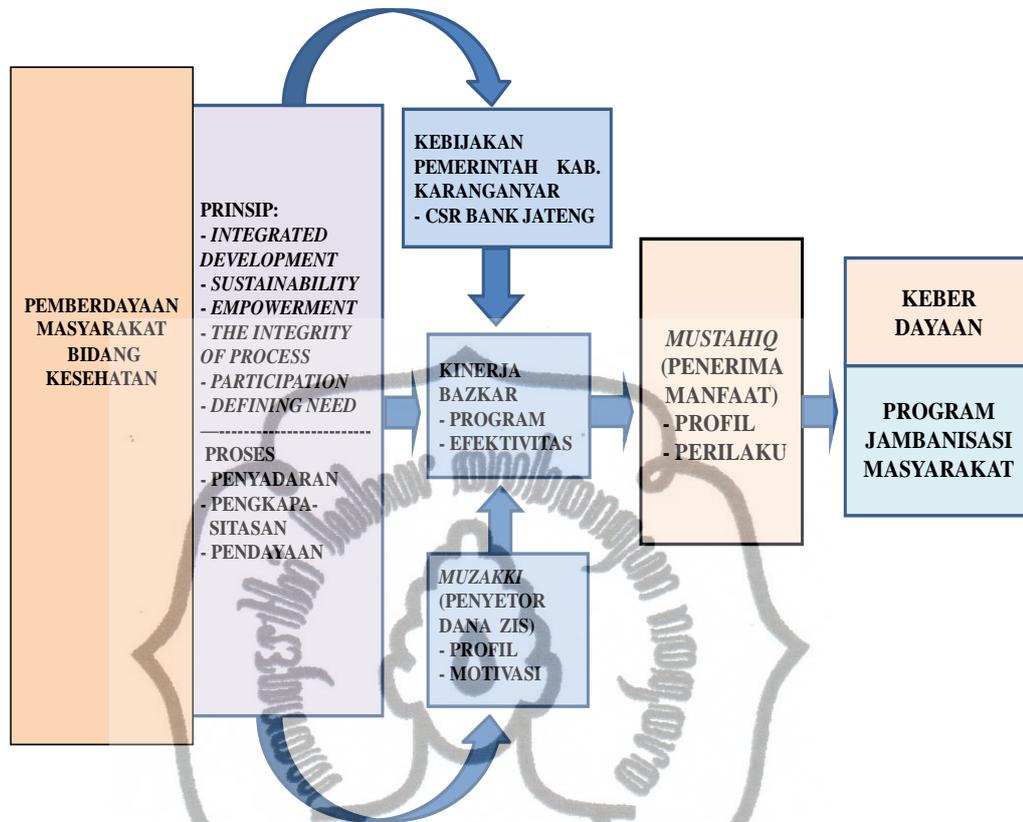
Di samping memperhatikan prinsip yang ada maka dalam pemberdayaan masyarakat perlu juga diperhatikan proses, maka dari sisi proses Randy dan Rian Nugroho berpendapat, bahwa pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan melalui kesadaran dan partisipasi penuh oleh para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri masing-masing menuju keadaan yang lebih baik. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukanlah sebuah "proses instan" sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan (Randy dan Nugroho, 2007: 3).

Dalam menjalankan tugasnya BAZKAR selalu berpedoman pada program dan kinerja BAZKAR dan disnergiskan pada RPJMD dan visi misi Kepala Daerah sehingga, di samping BAZKAR sebagai lembaga non pemerintah, memiliki program tersendiri tetapi selalu disinkronkan dengan program dan

kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar hal ini sangatlah perlu dipahami agar sasaran bidang pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai masyarakat penerima manfaat pemberdayaan yang sesuai hasil penelitian pendahuluan diantaranya meliputi bidang kesehatan lingkungan dengan program pemberdayaan melalui layanan jambanisasi masyarakat.

Secara teoretis dapat dikonsepsikan bahwa *integrated development, sustainability, empowerment, the integrity of process, participation* dan *defining need* sebagai prinsip pemberdayaan yang berproses melalui (penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan) dalam pemberdayaan yang tepat sasaran dan tepat program serta sinergis dengan para *stakeholders* ada harapan model kinerja BAZKAR dapat digarap melalui bidang kesehatan lingkungan dengan fokus pemberdayaan melalui program jambanisasi, sehingga upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat berjalan dan mencapai target yang ditetapkan.

Program jambanisasi masyarakat sangat penting dan mendasar karena dalam program STBM yang wajib digarap paling utama adalah pada sasaran menuntaskan kebiasaan masyarakat yang masih banyak berperilaku buang air besar sembarangan (BABS) maka pilihan program Pemerintah Kabupaten Karanganyar mempercepat akses jambanisasi (bantuan sumur bor, pembuatan jamban sehat dan sedot lumpur tinja) menjadi prioritas utama sangatlah tepat. Maka peneliti mengkaji dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan konsep perubahan perilaku melalui model yang tepat dan dilaksanakan secara terpadu, terjadwal melibatkan peran dan tanggung jawab bersama antara pemerintah Kabupaten Karanganyar, BAZKAR dan peran CSR BANK JATENG. Adapun pendekatan konsep dan teori pemberdayaan yang sesuai dengan program jambanisasi masyarakat dengan berbagai variabel penentu dan model keberdayaan yang tepat dapat digambarkan pada kerangka berpikir di bawah ini.



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Kinerja BAZNAS dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Karanganyar

Melalui gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa, wujud keberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan (jambanisasi masyarakat) sebagai variabel endogen atau variabel dependen, sangat dipengaruhi oleh variabel eksogen atau variabel independen pemberdayaan dalam program jambanisasi masyarakat yaitu prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang meliputi: (1) *integrated development*, pada prinsip ini keterpaduan dan keseimbangan ini dapat diciptakan bersama antara lembaga/pokja STBM, BAZKAR, dan pengelola CSR dengan masyarakat sasaran pemberdayaan atau (*mustahiq*), dan para penyotor dana (*muzzaki*), sehingga terjadi persamaan persepsi tentang pentingnya jamban sehat dan terus dilakukan upaya membangkitkan swadaya bagi para keluarga yang mampu dan bagaimana cara memberikan bantuan bagi keluarga yang tidak mampu perlu dirumuskan dan disepakati bersama. (2) *sustainability*, peran pendamping dalam program

jambanisasi masyarakat ini sangat perlu, tetapi keberlanjutan program ini juga sangat perlu pula, masyarakat juga harus diarahkan agar mampu mengelola sendiri sehingga muncul sikap bahwa jamban keluarga memang kebutuhan pokok dan dimanfaatkan sendiri demi keberlangsungan hidup. (3) *empowerment*, pemberdayaan mengandung arti masyarakat dapat meningkatkan kapasitasnya/berdaya agar dapat menentukan masa depannya untuk hidup sehat dengan adanya program jambanisasi dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat kedepannya. (4) *the integrity of process*, pemberdayaan masyarakat tidak hanya mementingkan hasil, namun juga proses itu sendiri. Proses di dalam pemberdayaan masyarakat akan melibatkan berbagai pihak antara lain lembaga/pokja STBM, BAZKAR, pengelola CSR, *muzakki* dan *mustahiq*, berbagai teknik dan strategi yang sesuai dengan keadaan masyarakat, dan kesemuanya harus terintegrasi serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar maupun berubah untuk tidak BABS. (5) *participation*, kemampuan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam prinsip ini perlu dijalankan, diawasi dan dievaluasi bila perlu adanya pendampingan sehingga dihasilkan jamban keluarga yang sehat dan memenuhi persyaratan. (6) *defining need*, dalam prinsip ini tujuan dan pelaksanaan program jambanisasi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini adalah untuk kehidupan yang lebih sehat.

Setelah prinsip-prinsip dipahami kepada masyarakat dan proses pemberdayaan yang meliputi; (1) penyadaran, (2) pengkapasitasan dan (3) pendayaan, dijalankan secara konsisten dengan menerapkan Kebijakan pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan CSR BANK JATENG dalam program kesehatan gratis sesuai dengan visi misi Kepala daerah Karanganyar tertuang dalam Misi Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2013-2018 misi yang ketiga yaitu "Pendidikan gratis SD/SMP/SMA dan kesehatan gratis", dan didukung pula dengan program kerja BAZKAR program ke dua yaitu "Karanganyar Sehat" melalui kinerja BAZKAR yang mampu menghimpun dan menggali potensi dana umat dalam bentuk ZIS dan semakin tingginya kepercayaan masyarakat atau para *Muzzaki* yang menyalurkan dananya ke BAZKAR dibuktikan hasil pengumpulan ZIS di Kabupaten selalu meningkat dan

tertinggi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu dalam satu tahun periode Januari sampai Desember 2018 terkumpul sebesar Rp 15.456.043.434 (lima belas milyar empat ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), hal ini juga menjadikan potensi luar biasa dalam mendukung kebutuhan *mustahiq* yang memerlukan bantuan dalam program jambanisasi masyarakat. Melalui prinsip dan proses pemberdayaan tersebut maka ada harapan bahwa kebijakan Pemerintah dan kinerja BAZKAR akan berjalan secara efektif, dengan menggerakkan pula potensi CSR BANK JATENG dan selalu meningkatkan kepercayaan para *Muzzaki*, ada harapan positif bahwa terjadi perubahan perilaku *mustahiq* untuk Stop BABS, dan program jambanisasi masyarakat dapat terwujud sesuai target yaitu selesai sebelum tahun 2019.

C. Dimensi Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dimensi adalah ukuran yang meliputi: panjang, luas, tinggi, lebar, dan sebagainya (Poerwadarminta, 2003: 37). Penjelasan yang ada dalam buku filsafat kuno, Dimensi adalah sebuah sistem yang mengukur gerak bebas. Sebuah benda dikatakan berada pada dimensi nol apabila benda tersebut tidak dapat bergerak sama sekali ke arah manapun, seperti salah satu contohnya adalah titik. Dimensi merupakan himpunan dari partikular-partikular yang disebut indikator. Setiap dimensi dalam satu konsep tidak harus mempunyai jumlah indikator yang sama (Mustafa, 2009: 7-8).

Dengan demikian yang dimaksud dimensi penelitian adalah indikator ataupun faktor-faktor dan variabel yang dikaji didalam suatu penelitian dengan tujuan untuk memberikan arahan mengenai pengukurannya, atau dapat dikatakan bahwa dimensi penelitian adalah variabel-variabel yang penting didalam penelitian sehingga variabel tersebut mempunyai hubungan dengan variabel lainnya. Terkait dengan pengertian tersebut, maka beberapa variabel penelitian yang akan dijabarkan adalah: (1) kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (2) efektivitas kinerja BAZKAR (3) perilaku *mustahiq* (4) implementasi Pemberdayaan (5) model pemberdayaan masyarakat dalam program jambanisasi.

Dalam penelitian maka akan dijabarkan beberapa variabel dari berbagai aspek dan metode pengukuran atas variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Dimensi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Kebijakan dapat definisikan sebagai suatu keputusan yang siap untuk dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya suatu tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi (Soenarko, 2003: 41). Sedangkan pendapat lain, mengkaitkan dengan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya, kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik (Tangkilisan, 2003): 1). Kemudian Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan berbagai halangan dan kesempatan, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak dan tujuan tertentu (Soenarko, 2003: 42).

Sehingga pada penelitian ini akan diukur melalui tindakan rasionalitas dan mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sejauh mana target penyelesaian program jambanisasi, sejak tahun 2013 Bupati Karanganyar menjabat mencanangkan program jambanisasi selesai tahun 2017 atau selesai akses sanitasi total berkelanjutan pada tahun 2019 sesuai target pemerintah pusat, maka pada penelitian ini juga dikaji seberapa besar keberhasilan atas target jambanisasi tersebut apakah betul-betul efektif program jambaninasi tersebut dengan melibatkan berbagai lembaga seperti BAZKAR dan melibatkan CSR BANK JATENG, dan berapa besar masing masing peranannya dalam program jambanisasi.

Selain fungsinya sebagai intermediasi antara pemilik modal dan penggunaanya, BANK JATENG berperan juga sebagai agen pembangunan dan salah satunya model tanggung jawab sosialnya ikut membantu penyaluran dana CSR BANK JATENG yang ada di Kabupaten Karanganyar dan mendorong

program pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu. Ini artinya selain mencari laba, harus ikut berperan secara nyata dalam pembangunan daerah di wilayah Jawa Tengah. Dalam penelitian dikaji pelibatan CSR BANK JATENG dengan prosedur yang bagaimana sehingga pemerintah kabupaten bisa bermitra dan masyarakat bisa memperoleh akses bantuan CSR BANK JATENG dalam periode tertentu yang dan sejauh mana dukungannya terhadap program pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini program jambanisasi.

Tindakan yang dilakukan masyarakat merupakan respon terhadap adanya sebuah program yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan dikaji dengan teori tindakan rasionalitas Max Weber yang terbagi menjadi empat macam, yaitu: rasionalitas instrumental; rasionalitas berorientasi nilai; rasionalitas afektif; dan rasionalitas tradisional. Perwujudan kebijakan CSR BANK JATENG telah mendapat legitimasi dari masyarakat. Pentingnya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar, BANK JATENG maupun masyarakat berdasarkan landasan kuat dalam memberikan bantuan CSR dalam memenuhi kaidah secara absah legal yang melahirkan kepuasan kerja bagi BANK JATENG. Dalam hal ini, langkah pertama yang dilakukan BANK JATENG adalah membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan cara memberikan dividen setiap tahun kepada pemilik dan pemegang saham, dalam hal ini gubernur dan para Bupati Wali Kota. “Sebab, dengan mendukung peningkatan PAD, berarti kita ikut membangun daerah. Dividen ini kemudian akan digunakan pemerintah daerah sebagai sumber belanja untuk membangun daerah di Jawa Tengah,” (Direktur Utama BANK JATENG Supriyatno di Jakarta, 1 Februari 201).

Dari dimensi ini akan dilihat sejauh mana proses dan bentuk kebijakan yang efektif dalam pelibatan peran CSR BANK JATENG sehingga bantuan CSR dapat diakses secara sah dan legal guna membantu mempercepat program jambanisasi, maka di samping konsep efektivitas kebijakan pemerintah juga diperlukan adanya dukungan berbagai pihak dalam proses penetapan dan pemanfaatan dana CSR BANK JATENG, hal inilah menjadi tolok ukur efektivitas dengan mengaitkan lima kriteria efektivitas tersebut salah satunya

adalah tumbunya rasa kepuasan kerja bagi BANK JATENG dan keikhlasan serta kepuasan masyarakat penerima manfaat CSR BANK JATENG.

2. Dimensi Efektivitas Kinerja BAZKAR

Dalam mengukur kinerja BAZNAS maka akan menggunakan teori Robbins et al., (2014: 46) mengemukakan bahwa indikator kinerja, yaitu: Kualitas, Kuantitas, Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. Berdasarkan uraian teori-teori dan konsep-konsep kinerja organisasi dan kinerja pegawai di atas, maka pengertian kinerja BAZKAR dalam penelitian ini adalah bentuk hasil program kerja BAZKAR guna membantu program jambanisasi, pada periode tertentu yang menyangkut kualitas, kuantitas dan prestasi, sejauh mana peran BAZKAR dalam menjembatani kesenjangan hubungan antara Pemerintah dengan para masyarakat yang terkendala akses pelayanan bantuan APBD, dan sebagai jembatan hubungan antara *muzzaki* dan *mustahiq* dalam pelibatan zakat untuk bantuan program jambanissasi. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja BAZKAR Kabupaten Karanganyar adalah: Produktivitas kerja; Kemampuan adaptasi kerja; Kepuasan kerja; Kemampuan berlabar; dan Pencarian sumber daya (Steers dalam Tangkilisan. 2005: 141).

Di samping hal tersebut maka juga akan di *cross check* dengan para *mustahiq* apakah telah mengetahui program kinerja BAZKAR maupun program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar, lebih penting juga di lakukan wawancara lapangan apakah para *mustahiq* penerima bantuan telah sesuai sasaran bantuan yang telah diterima, dan apakah telah bermanfaat.

3. Dimensi Perilaku *Mustahiq*

Dalam penelitian ini *mustahiq* dapat diberikan pengertian sebagai warga masyarakat sasaran atau masyarakat penerima manfaat dana dari Pemerintah, dana ZIS, maupun dana dari CSR BANK JATENG, khususnya masyarakat yang mendapat bantuan jambanisasi, sedang perilaku *mustahiq* adalah bagaimana tingkat perilaku *mustahiq* sejauh mana kesanggupan dan kemauan untuk merubah perilaku untuk tidak BABS, dan mampu membuat atau menerima bantuan jamban

sehat sebagai program jambanisasi menuju akses sanitasi total dari program pemerintah. Maka dari sisi *mustahiq* pada penelitian ini, akan diukur melalui teori perilaku apakah telah mau dan mampu merubah perilaku BABS.

Dengan demikian perasaan dalam merespon suatu objek dapat bersifat positif yaitu perasaan senang, menerima, terbuka dan lain-lain dan dapat juga negatif yaitu perasaan tidak senang, tidak menerima, tidak terbuka dan lain-lain. Berkaitan dengan perubahan perilaku *mustahiq* dalam menerima dan mau berubah untuk tidak lagi berperilaku BABS dalam program jambanisasi masyarakat ini, digunakan teori perilaku sosial yang dikembangkan oleh Katz dalam Sutisna (2002: 103-106) mengemukakan tentang adanya beberapa fungsi sikap dalam upaya untuk perubahan perilaku dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan, yaitu ada empat fungsi dari sikap, sebagai berikut:

- a. Fungsi prasarana (*The Utilitarian Function*), berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan hukuman. Pada fungsi ini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah produk itu memberikan kesenangan atau justru kekecewaan.
- b. Fungsi Pertahanan diri (*The Ego-Defensive Function*), disini sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego.
- c. Fungsi Ekspresi Nilai (*The Value-Expressive Function*), sikap yang dikembangkan oleh konsumen terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya (self-concept).
- d. Fungsi Pengetahuan (*The Knowledge Function*), membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya.

Sehingga pada penelitian ini perilaku *mustahiq* akan diukur sejauh mana perilaku para penerima bantuan jambanisasi, apakah betul betul, berubah tidak lagi BABS dan mau menerima bantuan. Maka penelusuran data dari pemberi bantuan yaitu pemerintah, BAZKAR dan CSR BANK JATENG dilakukan secara

mendalam di samping dilakukan wawancara kepada para pengelola dana pemerintah, pengelola dana ZIS maupun pengelola dana CSR BANK JATENG juga kepada para *mustahiq*. Dalam menstrukturkan hasil penelitian maka peneliti mengkaji perilaku *mustahiq* baik yang mampu mandiri maupun yang menjadi sasaran penerima bantuan apakah mau dan bersedia merubah perilakunya untuk stop buang air besar sembarangan, dalam program jambanisasi ini digunakan teori perilaku sosial, yang dikembangkan oleh Daniel Kazt dan dikutip oleh Sutrisno (2002: 103-106) dengan pengukuran melalui 4 kriteria dari fungsi sikap sebagai upaya perubahan perilaku.

4. Dimensi Implementasi Pemberdayaan melalui Kinerja BAZKAR

Implementasi dalam penelitian ini merupakan suatu proses yang berkaitan langsung dengan suatu kebijakan dan program-program yang akan diterapkan melalui kinerja BAZKAR yang sejalan dengan kebijakan pemerintah terutama dalam mempercepat akses sanitasi lingkungan untuk program jambanisasi masyarakat dengan pemanfaatan dana Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui APBD, dana ZIS melalui kinerja BAZKAR dan dana CSR melalui peran BANK JATENG untuk mendukung program-program jambanisasi tersebut, maka guna mencapai tujuan kinerja BAZKAR akan dilihat bagaimana prosesnya dan bagaimana indikator pengukurannya.

Proses implementasi pada penelitian ini sebagaimana dijelaskan Syukur dalam Surmayadi (2005: 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; 2) target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan; 3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kinerja BAZKAR dalam pemberdayaan masyarakat melalui program jambanisasi diperlukan indikator sebagaimana yang dikemukakan oleh AG. Subarsono (2008: 91) yang meliputi:

a. Komunikasi

Proses komunikasi efektif diperlukan dalam kerangka pelaksanaan kinerja BAZKAR. Ketua BAZKAR harus mengkomunikasikan kebijakan yang akan dilaksanakan kepada para Pimpinan BAZKAR dan para *Stakeholders* agar dapat berkomunikasi secara baik sehingga dapat memahami maksud dan tujuan kinerja BAZKAR dalam pemberdayaan melalui program jambanisasi, Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi dan integrasi. Komunikasi antar komponen pelaksana program jambanisasi perlu dilakukan secara intensif agar dapat optimal.

b. Sumber Daya

Adapun pentingnya masalah sumber daya dalam pelaksanaan program jambanisasi mencakup: Tim POKJA Jambanisasi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan pendamping program serta peran CSR. Semua dilibatkan secara aktif informasi dari para masyarakat penerima manfaat (*mustahiq*) akan sangat membantu dalam melaksanakan program.

c. Disposisi

Atau sikap yang dimaksud adalah sikap pelaksana kinerja BAZKAR dalam hal ini pelaksana program jambanisasi. Hal ini terkait dengan adanya sikap yang kuat bagi pelaksana yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan program. Komponen pelaksana program perlu sepenuh hati dan memiliki komitmen dalam melaksanakan fungsinya sehingga akan menghasilkan pandangan yang seimbang bahwa program jambanisasi dilaksanakan untuk pengembangan diri dan masyarakat ke arah yang lebih baik.

d. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kinerja BAZKAR melibatkan banyak orang, bidang dan lingkungan sehingga dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan kebijakan. Masalah koordinasi antar struktur birokrasi dapat menjadi penghambat pelaksanaan kinerja. Untuk itu diperlukan sebuah prosedur tetap atau *standard operational procedure* (SOP) ataupun proses untuk kelancaran kinerja dari BAZKAR. Dalam penelitian ini indikator keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program jambanisasi dilihat yang berkaitan dengan indikator

atau kriteria yang dijelaskan oleh AG. Subarsono (2008: 91) empat variabel sebagai indikator yang mempengaruhi hasil implementasi proses pemberdayaan masyarakat dalam program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar.

5. Dimensi Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Jambanisasi

Menurut (Wrihatnolo dan Dwidjowojoto, 2007: 3) pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan sehingga mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik. Dalam dimensi ini pemberdayaan adalah prinsip dan proses yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, BAZKAR dan CSR BANK JATENG di samping melalui prinsip dalam menyelesaikan program jambanisasi di Kabupaten Karanganyar. Dalam model pemberdayaan ini juga akan dikaji terkait komitmen pemimpin yang akan melengkapi prinsip pemberdayaan, dalam penerepannya juga akan dilihat bagaimana fungsi manajemen POAC yang dikembangkan oleh George R. Terry (2006).

Sedangkan keberdayaan dalam dimensi ini adalah bentuk hasil pemberdayaan masyarakat penerima bantuan jambanisasi, maka keberdayaan jambanisasi bisa diukur sejauhmana proses pemberdayaan dalam program jambanisasi bagaimana proses penyadarannya, pengkapasitasnya dan proses pendayaannya. Melalui wawancara dan pendataan bagaimana model penyaluran dana apakah dilaksanakan sendiri oleh masyarakat apakah model bangunan jamban keluarga diterima sudah jadi. Dalam mengkaji model pemberdayaan maka, dengan melihat bentuk koordinasi dan upaya menggerakkan masyarakat untuk segera mau merubah perilaku dan mau menerima bantuan dari dana zakat dan CSR BANK JATENG peneliti mengamati dan medalami konteks tahapan, proses dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sejauh mana hasil kebijakan pemerintah dalam program jambanisasi melalui pemberdayaan masyarakat yang belum memiliki jamban sehat, itu semua tentu berdampak terhadap keberlangsungan program, yaitu mengenai pemberdayaan bagi para *mustahiq*.

commit to user

Berdasarkan hal tersebut Suharto (2005) mendefinisikan lima jenis kebutuhan sebagai ukuran dalam suatu program, yakni:

a. Kebutuhan *absolute*

Kebutuhan *absolute* yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat mempertahankan hidupnya. Dalam program pengembangan jambanisasi hal ini terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi. Program jambanisasi memberikan dampak positif yang dirasakan masyarakat terutama dari kondisi ekonomi menengah kebawah.

b. Kebutuhan *normative*

Kebutuhan *normative* adalah kebutuhan yang didefinisikan oleh para ahli atau tenaga profesional kebutuhan ini biasanya didasarkan standar tertentu. Dalam program jambanisasi hal ini terkait dengan kebutuhan *normative* petani berhubungan dengan keberpihakan masyarakat terhadap pemerintah.

c. Kebutuhan yang dirasakan

Kebutuhan yang dirasakan adalah sesuatu yang dianggap atau dirasakan orang sebagai kebutuhannya. Kebutuhan ini merupakan petunjuk tentang kebutuhan yang nyata, kebutuhan ini berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Hal ini tergantung pada persepsi orang yang bersangkutan mengenai sesuatu yang diinginkan pada satu waktu tertentu.

d. Kebutuhan yang dinyatakan

Kebutuhan yang dinyatakan adalah kebutuhan yang dirasakan yang diubah menjadi kebutuhan berdasarkan banyaknya permintaan. Besarnya kebutuhan ini tergantung pada seberapa banyak orang yang memerlukan pelayanan sosial. Berikut adalah kebutuhan yang dinyatakan terkait dengan pemenuhan fasilitas sanitasi (jamban) dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

e. Kebutuhan komparatif

Kebutuhan komparatif adalah kesenjangan (*gap*) antara tingkat pelayanan yang ada di wilayah-wilayah yang berbeda untuk kelompok orang yang memiliki karakteristik sama. Melalui lima jenis ukuran kebutuhan ini maka diharapkan peneliti dapat menganalisis apakah pemberdayaan masyarakat dapat menemukan

model yang efektif dalam program jambanisasi masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Dalam model pemberdayaan ini juga dirumuskan bahwa adanya model kerja bareng yang menjadi temuan bersama dalam mensukseskan program jambanisasi. Dalam model kerja bareng ini ditemukan bahwa komitmen pemimpin juga berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat. Pemimpin tidak boleh hanya mempunyai kemampuan dalam menentukan dan merumuskan visi dan misi perusahaan saja, namun juga harus mempunyai kemampuan manajerial. Indikator fungsi manajemen yang digunakan menurut George R. Terry (2006), yaitu disingkat menjadi POAC: *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*.

